

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
HUTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA
DARI TAHUN 1990-2009**



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

**Catur Wibowo
F 0104038**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2012

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUTANG LUAR NEGERI
PEMERINTAH INDONESIA DARI TAHUN 1990-2009**



Surakarta, Juni 2011

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

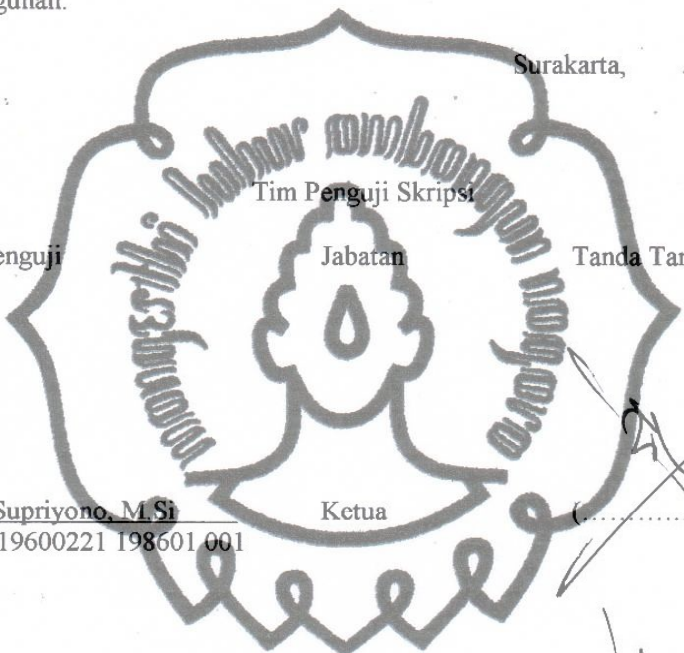
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guntur Riyanto', is written over a horizontal line.

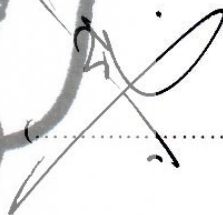


Dr. Guntur Riyanto, M.Si
NIP. 19580927 198601 001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh para tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas sebelas Maret Surakarta, guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Surakarta, Januari 2012



Nama Penguji	Tim Penguji Skripsi	Jabatan	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Supriyono, M.Si</u> NIP. 19600221 198601 001	Ketua	
2. <u>Dr. Guntur Riyanto, M.Si</u> NIP. 19580927 198601 001	Pembimbing	
3. <u>Drs. Sutanto, M.Si</u> NIP. 19561129 198601 001	Anggota	

MOTTO

Allah Maha Besar, Allah Maha kuasa

Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah anda raih, namun kegagalan yang telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap berjuang menghadapi rintangan.



PERSEMBAHAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ibu Bapak tersayang untuk doa dan pengorbanannya

Alumamaterku Ekonomi Pembangunan UNS '04



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, ata limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA DARI TAHUN 1989-2009”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Guntur Riyanto, M.Si selaku pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, dan motifasinya serta kesabarannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Dra. Izza Mafruhah, M.Si selaku pembimbing akademik dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, terima kasih untuk bimbingan dan arahnya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan surat keputusan menyusun skripsi dan ijin penelitian.
4. Drs. Supriyono, M.Si dan Drs. Sutanto, M.Si selaku penguji skripsi.
5. Bapak Ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu dalam pembekalan materi dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
7. Ibunda dan Ayahanda tercinta atas kasih sayang, kesabaran dan motifasi serta doa restu yang senantiasa mengiringi langkahku.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik mental maupun spiritual.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang menuju ke arah perbaikan skripsi ini akan penulis perhatikan. Meskipun demikian penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan

awal bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, Januari 2012



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Sejarah Perkembangan Utang Luar Negeri	6
B. Utang Luar Negeri	7
C. Utang Luar Negeri Negara Berkembang	11
D. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Indonesia	20

E. Pemanfaatan dan Beberapa Permasalahan yang Muncul Akibat Utang Luar Negeri	23
F. Pendapatan Nasional	28
G. Pengeluaran Dalam Negeri (Pengeluaran Pemerintah)	33
H. Defisit Anggaran	35
I. Penelitian Terdahulu	38
J. Kerangka Pemikiran	41
K. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Ruang Lingkup Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Definisi Operasional Variabel	44
D. Model dan Alat Analisis	45
1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil.....	45
2. Uji Statistik	46
a. Uji t	46
b. Uji F	47
c. Uji Asumsi Klasik.....	49
1) Uji Autokorelasi.....	49
2) Multikolinieritas.....	51
3) heterokedastisitas	51

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	53
A. Pembahasan Variabel-Variabel Penelitian.....	53
1. Variable Utang Luar Negeri (ULN)	53
2. Variable Pendapatan Nasional (PDB)	54
3. Variable Pengeluaran Dalam Negeri (PDN)	55
4. Variabel Defisit Anggaran	57
B. Hasil Regresi.....	62
C. Pengujian Asumsi Klasik.....	62
1. Multikolinientas	62
2. Autokorelasi	63
3. Heteroskedastisitas	64
D. Koefisien Determinasi	65
E. Pengujian t-Statistik.....	65
1. Uji t-Statistik Variabel PDB	66
2. Uji t-Statistik Variabel PDN	67
3. Uji t-Statistik Variabel Defisit Anggaran	68
4. Uji t-Statistik Utang Luar Negeri Tahun Sebelumnya	68
F. Pengujian F Statistik.....	69
G. Interpretasi Hasil Regresi.....	70
1. Produk Domestik Bruto (PDB)	70
2. Pengeluaran dalam Negeri (PDN)	70
3. Defisit Anggaran (DA)	70

4. Utang Luar negeri Tahun Sebelumnya (ULNt-1) 71

BAB V PENUTUP72

A. Kesimpulan72

B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
2.1 Klasifikasi Sektor Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah	34
2.2 Komponen utama APBN	37
3.1 Uji Statistik Durbin-Watson	47
4.1 Hasil Regresi Linear	62
4.2 Hasil pengujian multikolinieritas	63
4.3 Hasil uji white Test.....	65
4.4 Hasil uji t statistik.....	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1.1 Kesenjangan Tabungan dan Investasi	10
1.2 Kerangka pemikiran	42
3.1 Autokorelasi	47
3.2 Daerah Diterima Dan Daerah Tolak Uji t	50
3.3 Daerah Diterima Dan Ditolak Uji F	52
4.1 Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 1990-2009	54
4.2 Perkembangan PDB Indonesia 1990-2009	55
4.3 Perkembangan Pendapatan Dalam Negeri Indonesia 1990-2009	56
4.4 Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia 1990-2009	61
4.5 Autokorelasi	64

ABSTRAK

Catur Wibowo
NIM.F0104038

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
HUTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA
DARI TAHUN 1989-2009**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Nasional, pengeluaran dalam negeri, defisit anggaran, utang luar negeri tahun sebelumnya terhadap Utang Luar Negeri Indonesia tahun 1990-2009. Sehubungan dengan hal itu diajukan hipotesis 1) Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan nasional terhadap utang luar negeri Indonesia. 2) Terdapat pengaruh yang signifikan pengeluaran dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. 3) Terdapat pengaruh yang signifikan defisit anggaran terhadap utang luar negeri Indonesia. 4) Terdapat pengaruh yang signifikan utang luar negeri sebelumnya terhadap utang luar negeri Indonesia. 5) Variabel independen (Pendapatan Nasional, Pengeluaran Dalam Negeri, Defisit Anggaran, Utang Luar Negeri Tahun Sebelumnya) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Utang Luar Negeri)

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk analisis kuantitatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia dengan menggunakan data runtut waktu (time series) antara tahun 1990-2009. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah utang luar negeri Indonesia, sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Nasional, Pengeluaran Dalam Negeri, Defisit Anggaran, Utang Luar Negeri Tahun Sebelumnya. Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (*ordinary least square*) dengan bantuan program komputer Evies4.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari perhitungan t dan F hitung dapat diketahui bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Variabel Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri tahun sebelumnya berpengaruh secara parsial terhadap dependen, sedangkan variabel PDB dan Pengeluaran Dalam Negeri secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu utang luar negeri Indonesia pada taraf signikansi 5%.

Berdasarkan hasil kesimpulan diajukan beberapa saran yaitu : 1). Kepada Pemerintah : Besarnya sasaran defisit anggaran ditetapkan pada tingkat yang terkendali dalam jangka panjang. Penyusunan perkiraan penerimaan, pemilihan kegiatan prioritas, dan penentuan sumber pembiayaan harus diperhitungkan secara cermat hingga dicapai suatu keseimbangan dan kombinasi yang optimal diantara ketiga komponen tersebut, sehingga pembiayaan defisit anggaran yang berasal dari Utang Luar Negeri dapat dikurangi dan hendaknya pemerintah berupaya mencari cara lain selain daripada hanya memperbesar Utang Luar negeri, misalnya dengan meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi asing di dalam negeri, dan lain sebagainya. Bagi penelitian selanjutnya : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Defisit Anggaran memiliki peran yang besar terhadap peningkatan Utang Luar Negeri Indonesia, diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Defisit Anggaran (DA) atau apakah ada faktor lain diluar Defisit Anggaran (DA) yang bisa mempengaruhi Utang Luar Negeri.

commit to user

Kata Kunci: Utang Luar Negeri, PDB, Pengeluaran Dalam negeri, Defisit Anggaran

ABSTRACT

Catur Wibowo
NIM.F0104038

**AN ANALYSIS OF SOME FACTORS THAT INFLUENCING THE
INDONESIAN GOVERNMENT'S FOREIGN LOAN
FROM 1989 TO 2009**

The aim of this study is to analyze the influence of the National Income, the domestic expenditure, the estimates deficit, the previous year foreign Loan to the Indonesia's Foreign Loan 1990 – 2009. Related to those matters, it is proposed some hypothesis: 1) There is some significant influence from the national income to the Indonesia's foreign Loan. 2) There is some significant influence from the domestic expenditure to Indonesia's foreign Loan. 3) There is some significant influence from the estimates deficit to the Indonesia's foreign Loan. 4) There is some significant influence from the previous foreign Loan to the Indonesia's foreign Loan. 5) The Independent variables (National Income, Domestic expenditure, Estimates Deficit, the Previous Foreign Loan) simultaneously give a significant effect to the dependent variable (Foreign Loan).

This study is a quantitative analysis study about some factors that influence the Indonesia's foreign Loan by using time series data from 1990 until 2009. The dependent variable in this study is Indonesia's foreign Loan, whereas the independent variables are the National Income, the Domestic Expenditure, the Estimates Deficit, and the Previous Foreign Loan. The data analysis is done by Ordinary Least Square (OLS) with the assistance of Evies4 computer program.

The result of the analysis shows that from the calculation of t and F , it can be seen that the independent variables simultaneously give some influence to the dependent variable. The Estimates Deficit and the Previous Foreign Loan give influence partially to the dependent variable, whereas PDB variable and the Domestic expenditure partially do not give any significant influence to the dependent variable, that is Indonesia's foreign Loan on a significance level of 5%.

Based on the conclusion, it is proposed some suggestion: 1) For the government: The quantity of the estimates deficit should be determined on a long term controlled level. The arrangement of the income estimation, the election of the priority activities, and the determination of the funding source should be calculated accurately until it achieves an optimal balance and combination among the three components, so that the funding of the estimates deficit that comes from the Foreign Loan can be reduced and the government should make some efforts to find the other way other than increasing the foreign Loan, for examples by increasing the export, increasing foreign investment in this country, etc. 2) For the other researchers: The result of the study shows that the Estimates Deficit has a significant role to the increasing of Indonesia's Foreign Loan. The researchers should be able to study what factors influencing the Estimates Deficit (DA) or Are there any factors other than the Estimates Deficit (DA) that are capable in increasing the Foreign Loan.

Keywords: the Foreign Loan, PDB, the Domestic expenditure, the Estimates Deficit.

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap negara membutuhkan dana yang besar bagi keperluan pembangunan ekonominya. Meskipun demikian dalam upaya penghimpunan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut seringkali mengalami banyak kendala. Banyak kendala yang dihadapi oleh negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana pembangunan baik yang bersumber dan penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor maupun dari masyarakat yang diperoleh melalui sektor penerimaan seperti pajak dan lembaga keuangan yang ada.

Dalam rangka upaya penghimpunan dana dari masyarakat dana dapat diperoleh dan sumber pengerahan dana dari dalam negeri dan pengerahan modal yang bersumber dari luar negeri. Sumber modal ini dapat dijadikan dasar dalam pengklasifikasian dana untuk pembangunan. Penghimpunan modal dari dalam negeri pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sumber yang utama, diantaranya yaitu: tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa (Sukirno, 2002).

Upaya penghimpunan modal yang diperoleh dari dalam negeri bagi negara-negara yang sedang berkembang cenderung relatif lebih sulit diandalkan. Hal ini dikarenakan bahwa tabungan sukarela yang dipercayakan pada lembaga-lembaga keuangan masih relatif sedikit dibandingkan dengan besarnya dana yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan. Selain itu

adanya pola pikir masyarakat yang masih tradisional juga akan dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat yang lemah terhadap lembaga keuangan.

Selain itu adanya kesalahan pihak manajemen lembaga keuangan seperti bank yang salah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dan masyarakat kepada pihak ketiga untuk pembiayaan kegiatan yang kurang produktif seringkali menjadi penyebab lemahnya kemampuan lembaga keuangan dalam penghimpunan dana dari masyarakat.

Pada dasarnya di negara berkembang seperti di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara jumlah tabungan dengan kebutuhan investasi yang ada di masyarakat. di mana penghimpunan dana dan masyarakat yang diperoleh dari tabungan masih belum mampu untuk membiayai investasi pemerintah. Sehingga kesenjangan antara tabungan dan investasi terjadi begitu lebar. Kesenjangan yang begitu lebar ini menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan investasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan perekonomian dalam mengakumulasi tabungan nasional. Secara teoritis, kesenjangan antara tabungan dan investasi inilah kemudian harus ditutup dengan bantuan luar negeri (utang luar negeri).

Pada saat ini diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan pemerintah di luar minyak dan gas dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas negara dirasakan belum maksimal dibandingkan dengan potensi wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Meskipun pertumbuhan penerimaan dan sektor pajak yang senantiasa

meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dengan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang belakangan dilakukan oleh pemerintah tetapi, kenyataannya hal ini masih belum dapat berjalan dengan seimbang dibandingkan dengan kebutuhan investasi yang ada.

Menyikapi kondisi yang demikian, alternatif pengalihan dana dari luar negeri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya pengalihan dana dari luar negeri harus dilakukan dengan baik agar menghindarkan adanya defisit anggaran. Untuk itulah perlu dilakukannya efisiensi dalam berbagai aktivitas pembangunan. Kebijakan dalam pengalihan modal dalam negeri dirasakan mempunyai resiko yang besar terhadap munculnya inflasi yang tinggi yang diakibatkan karena adanya defisit anggaran akibat besarnya utang luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya utang luar negeri juga mempunyai peran yang penting dalam rangka menutup kekurangan anggaran pembangunan yang terjadi di Indonesia karena adanya kesulitan dalam pengumpulan modal dalam negeri. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis bermaksud mengangkat permasalahan ini sebagai bahan analisis. Untuk itu dalam penelitian ini diberi judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA DARI TAHUN 1990-2009”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009?
3. Bagaimana pengaruh defisit anggaran terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009?
4. Bagaimana pengaruh utang luar negeri sebelumnya terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009?
5. Bagaimana pengaruh variabel independen (Pendapatan Nasional, Pengeluaran Dalam Negeri, Defisit Anggaran, Utang Luar Negeri Tahun Sebelumnya) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Utang Luar Negeri).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasional terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009.

3. Untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009.
4. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri sebelumnya terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Pendapatan Nasional, Pengeluaran Dalam Negeri, Defisit Anggaran, Utang Luar Negeri Tahun Sebelumnya) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Utang Luar Negeri).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi utang luar negeri, sehingga pemerintah dapat berusaha untuk menghindari atau mengurangi faktor tersebut sehingga secara perlahan utang luar negeri Indonesia dapat berkurang.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini selain dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi atau acuan terhadap penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Utang Luar Negeri

Fenomena mengalirnya modal dari luar negeri untuk membiayai pembangunan oleh negara berkembang telah dimulai sebelum tahun 1914, dimana dalam kurun waktu antara 1870 hingga tahun 1914, Krugman et.al (1999) mengatakan negara-negara berkembang telah menyerap dana dari Inggris rata-rata 5% dari *Gross National Product* (GNP), Perancis 2% dan Jerman sebesar 3% dari GNP nya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pertumbuhan utang negara-negara berkembang semakin membengkak dalam kurun waktu antara 1973 hingga tahun 1974 yang kemudian disusun dalam kurun waktu kedua antara 1979 hingga tahun 1982. sebagai gambaran, menurut IMF pada tahun 1982 saja, pinjaman yang dilakukan oleh negara-negara berkembang meroket mendekati US\$ 600 miliar.

Aliran modal yang berasal dari luar negeri dapat disebut sebagai utang luar negeri apabila memiliki ciri-ciri pokok yaitu:

1. Aliran modal yang bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan
2. Dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku di pasaran internasional.

Dilihat dari kewajiban pengembaliannya,. Utang luar negeri dapat dibedakan menjadi bentuk pemberian (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*).

commit to user

Kedua bentuk ini meskipun berbeda dalam hal syarat-syarat pengembaliannya, tetapi memiliki keterkaitan yang erat antara bentuk pemberian dan pinjaman.

Sebagian besar negara kreditur memberikan dana secara cuma-cuma ke negara debitur apabila negara yang bersangkutan telah memiliki ikatan yang lama dan kuat dalam hal pinjam meminjam dana. Bahkan terkadang pertimbangan pemberian dana oleh negara kreditur didasarkan pada alasan keamanan dan politik. Selain itu, pemberian tersebut tidak semata-mata dalam bentuk mata uang, melainkan dalam bentuk barang dan pemberian tenaga ahli tertentu.

Sukirno (2002) mengatakan, ditinjau dari sudut manfaat, ada dua peran utama bantuan luar negeri (utang luar negeri) yaitu:

1. Untuk mengatasi kekurangan mata uang asing
2. Untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan

Kedua masalah tersebut biasa disebut dengan masalah jurang ganda (*the two problems*), yaitu jurang tabungan (*saving gap*) dan jurang mata uang asing (*foreign exchange gap*).

B. Utang Luar Negeri

Ditinjau dan kajian teoritis, masalah utang luar negeri dapat diterangkan melalui pendekatan pendapatan nasional. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, utang luar negeri dibutuhkan untuk menutupi 3 (tiga) defisit, yaitu kesenjangan tabungan investasi, defisit anggaran dan *defisit* transaksi berjalan. Hubungan ketiga defisit ini dijelaskan

Basri (2004) dengan menggunakan kerangka teori *three gp model* yang diperoleh dan persamaan identitas pendapatan nasional, yaitu:

1) Sisi Pengeluaran

$$Y = C+I+G+(X-M).....(1)$$

Dimana:

Y = Produk Domestik Bruto

C = Total Konsumsi Masyarakat

I = Investasi Swasta

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor barang dan jasa

M = Impor barang dan jasa

2) Sisi Pendapatan

$$Y = C+S+T.....(2)$$

Dimana:

C = Total Konsumsi Masyarakat

S = Tabungan Pemerintah

T = Penerimaan Pajak Pemerintah

Jika kedua sisi identitas pendapatan nasional digabung, maka akan diperoleh:

$$(M-X) = (I-S)+(G-T).....(3)$$

Dimana:

(M-S) = Defisit Transaksi Berjalan

(I-S) = Kesenjangan Tabungan Investasi
commit to user

$(G-T) = \text{Defisit Anggaran Pemerintah}$

Hubungan antara kebutuhan utang luar negeri dan ketiga defisit tersebut diperlihatkan dengan menggunakan persamaan identitas neraca pembayaran yaitu:

$$Dt = (M-X)_t + Dst - NFL_t + Rt - NOLT \dots \dots \dots (4)$$

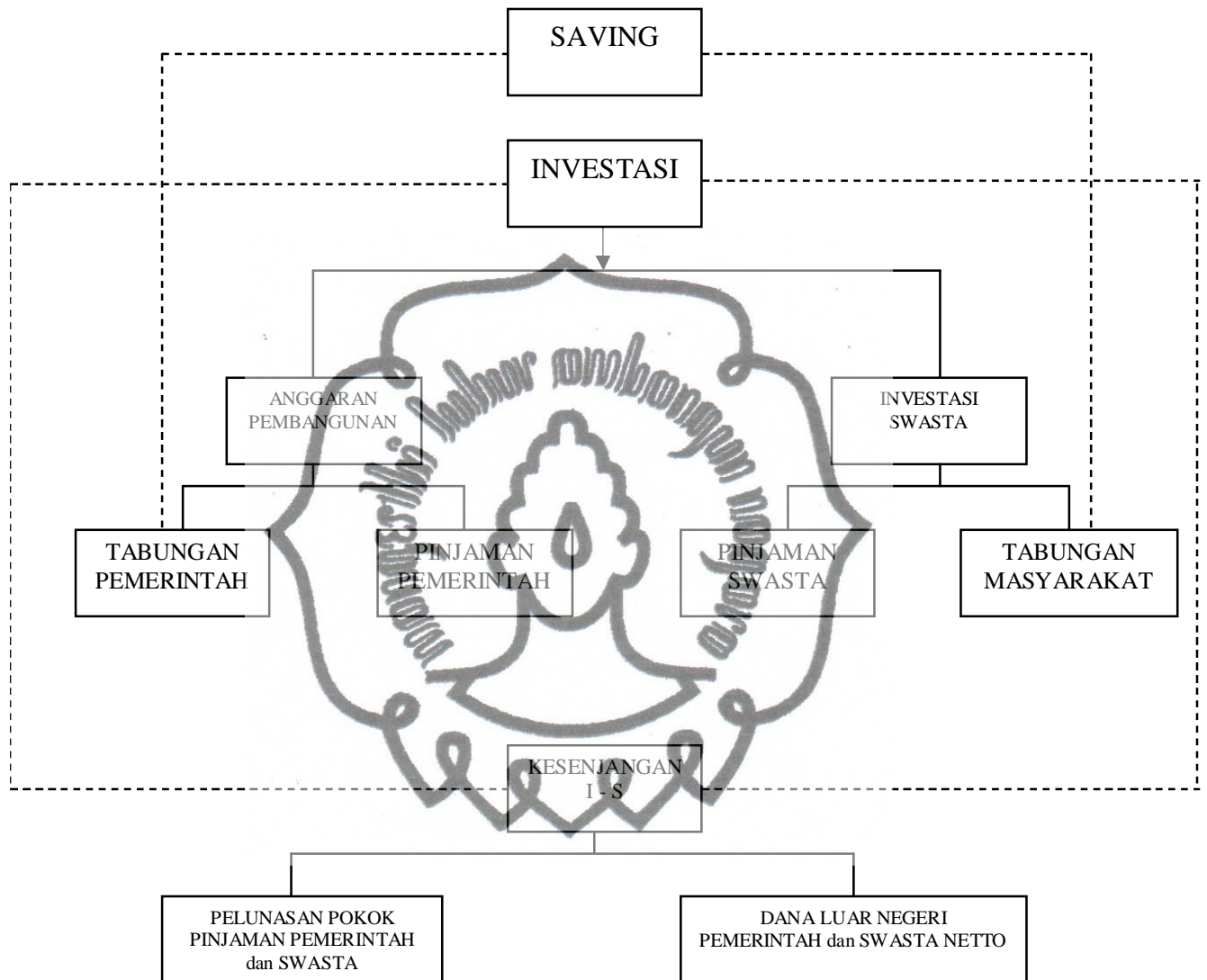
Dimana:

- Dt = Utang pada tahun 1
- $(M-X)_t$ = Defisit transaksi berjalan pada tahun 1
- Dst = Pembayaran Beban Utang (bunga+amortisasi) pada tahun 1
- NFL_t = Arus masuk bersih modal swasta tahun 1
- Rt = Cadangan otoritas moneter tahun 1
- $NOLT$ = Arus masuk modal bersih jangka pendek seperti *capital flight* dan lain-lain pada tahun 1.

Persamaan ini menunjukkan bahwa utang luar negeri (sisi kiri) digunakan untuk membiayai defisit transaksi berjalan. Pembayaran utang cadangan otoritas moneter dan kebutuhan modal serta pergerakan arus modal jangka pendek seperti *capital flight*. Bila (3) disubsitusikan pada (4), maka akan diperoleh persamaan:

$$Dt = (Is)_t + (G-T)_t + DSt + NFL_t + Rt - NOLT \dots (5)$$

Identitas (5) ini menunjukkan, di samping untuk membiayai defisit transaksi berjalan, utang luar negeri juga dibutuhkan untuk membiayai anggaran pemerintah, serta kesenjangan tabungan investasi dengan utang luar negeri, seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Kesenjangan Tabungan dan Investasi

Sumber: Jhingan (2000)

C. Utang Luar Negeri Negara Berkembang

Sekian waktu lamanya pandangan bahwa sumber pembiayaan dari luar negeri merupakan alternatif yang paling tepat dalam membiayai kekurangan modal pembangunan, menjadikan masalah ini menjadikan argumen oleh setiap pengambil kebijakan di sebagian besar negara-negara berkembang dan terbelakang. Cara ini dipandang sebagai alternatif yang paling mudah ditempuh oleh negara bersangkutan dalam usahanya memperoleh dana yang relatif besar dan terjaminnya secara kontinyu sumber dana yang dimaksud.

Hal yang mendasari argumen tersebut bahwasanya hubungan pinjam meminjam dana tidak selalu berdasarkan pada pertimbangan ekonomis belaka. Di luar pertimbangan tersebut, banyak alasan yang mendorong negara-negara maju untuk memberikan bantuannya kepada negara-negara berkembang, diantaranya adalah alasan untuk mempererat hubungan politik diantara negara yang memberi dan menerima bantuan serta alasan untuk membendung pengaruh ideologi yang mungkin saja bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh negara pemberi bantuan.

Ini berarti bahwa negara berkembang yang secara ekonomi dipandang akan sulit melunasi kewajiban utang-utangnya, dapat saja memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membangun, jikalau dipandang dari sudut politik, pertahanan dan keamanan serta ideologi, memiliki kepentingan tertinggi bagi negara kreditur. Sebagai gambaran, di beberapa negara terutama Amerika Serikat, Rusia, dan Republik Rakyat Cina (RRC), bantuan luar negeri selalu digunakan sebagai alat untuk membendung pengaruh ideologi yang

bertentangan dengan ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang mereka anut.

Amerika Serikat mengerahkan modalnya untuk membiayai pembangunan di Eropa Barat dan Jepang., sementara Rusia dan RRC menawarkan bantuan teknik dan modalnya kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Secara historis, mengalirnya dana bantuan luar negeri ke negara-negara berkembang, tidak lepas dari perasaan bersalah negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang yang pernah dijajah di masa lampau. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri tersebut sering dipandang sebagai bagian dari "penebus dosa" dan balas jasa negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.

Kesan balas jasa tersebut dapat dilihat dari sifat bantuan yang diberikan sebagian dari bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian (*grant*) yang berupa bantuan teknik dan tenaga ahli serta bantuan bahan makan. Sebagian besar lagi adalah bantuan yang bersifat komersial namun memiliki syarat-syarat yang lebih ringan dari bantuan komersial lainnya, diantaranya adalah tingkat bunga yang lebih rendah serta tenggang waktu (*grace period*) yang relatif panjang mencapai waktu 20 tahun jatuh temponya.

Berdasarkan kondisi ini, sebagian besar negara berkembang, yang memerlukan dana bagi pembangunannya cenderung lebih memilih mencari alternatif sumber biayanya dari luar negeri. Disamping itu, hubungan pinjam-

meminjam dana seringkali bernuansa ekonomi politik. Banyak diantar kreditur menyalurkan dananya ke negara berkembang, terutama bekas daerah jajahannya dimasa lalu dengan pertimbangan kemungkinan pengembangan pasar hasil industriya. Ini dapat dimaklumi oleh karena akibat penjajahan, negara-negara maju mempunyai tempat yang istimewa dimata negara-negara berkembang bekas jajahannya. Fenomena ini dapat dilihat dari pola pemberian bantuan yang dilakukan oleh Perancis dan Inggris. Di kedua negara ini, sebagian dananya dialokasikan untuk membiayai pembangunan di negara-negara bekas jajahan mereka.

Namun tanpa disadari, hubungan keterkaitan yang erat ini menimbulkan masalah baru yang cukup serius, terutama dampaknya bagi negara-negara berkembang atau negara debitur. Meskipun keterkaitan ini menimbulkan ketergantungan satu sama lain, namun ditinjau dari struktur dasar perekonomian, negara-negara berkembang lebih rapuh terhadap gejolak fluktuasi makro ekonomi, bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Bahkan dalam taraf tertentu, ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju terutama dalam masalah utang, mengurangi kebebasan dan arti sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk itu seringkali sebagai negara berdaulat, masalah utang luar negeri dituding sebagai kolonialisme baru yang berubah wajah.

Bentuk campur tangan pihak lain dalam mengatur perekonomian dan penerapan kebijaksanaan ekonomi di negara-negara debitur pernah dilakukan oleh *International Monetary Fund (IMF)* terhadap negara-negara di kawasan
commit to user

Amerika Latin seperti Brazil dan Meksiko yang terjerat oleh utang. Campuran oleh pihak lain, semisal yang dilakukan IMF adalah dalam hal penerapan program stabilisasi makro ekonomi.

Pemberian pinjaman dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga akhir dekade abad ke-20 ditandai dengan gelombang naik-turun, seiring dengan kondisi perekonomian yang dihadapi dunia pada dekade tersebut. Lonjakan pemberian pinjaman terjadi sejak akhir abad ke 19 hingga awal tahun 1980-an, lalu turun tajam pada tahun 1982 akibat depresi besar. Puncak kontraksi arus pinjaman ke negara berkembang terjadi pada tahun 1982. Merosotnya secara drastis pinjaman negara-negara maju ke negara-negara berkembang dalam dekade tahun 1980-an disebabkan terjadinya resesi ekonomi dunia antara tahun 1981 hingga tahun 1983 yang merupakan resesi ekonomi terparah sejak tahun 1930-an.

Fenomena penarikan dan pemberian dana dari negara maju ke negara berkembang dapat dikatakan dimulai sejak sebelum meletus Perang Dunia I, yaitu sebelum tahun 1914. namun kredit yang tersalur ke negara berkembang tersebut pada umumnya adalah kredit biasa yang diberikan berdasarkan pertimbangan ekonomi belaka tanpa ada pertimbangan politik. Antara tahun 1870 hingga tahun 1914 saja, Inggris misalnya, telah menginvestasikan sebesar 5% GNP-nya ke luar negeri. Sedangkan Perancis dan Jerman menginvestasikan sedikitnya 2% sampai 3% dari GNP-nya untuk memberikan kredit ke negara-negara berkembang.

Meskipun ada ancaman dalam hal terjadinya kemacetan pengembalian pinjaman, pada kenyataannya arus dana pinjaman tersebut terus saja mengalir. Ada 3 faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu: Pertama, peluang investasi asing di negara-negara berkembang dilihat dari sudut ekonomi sangat menguntungkan, banyak terdapat kawasan kaya sumber daya alam yang belum dieksploitasi. Kedua, di negara-negara diluar Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, Argentina dan Australia merupakan negara yang masih jarang penduduknya, sehingga migrasi penduduk yang terjadi di negara-negara tersebut bila diimbangi dengan tersedianya modal untuk investasi merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Ketiga, peranan Inggris sebagai pemain utama ekonomi dunia begitu dominan. Hal ini ditunjang dari infrastruktur ekonomi dan keuangan Inggris yang lebih baik dibandingkan negara lain pada masa itu. Inggris begitu banyak memiliki dana tabungan untuk di investasikan di seluruh dunia, terbukanya pasar di Inggris bagi barang ekspor dari negara berkembang serta lembaga-lembaga keuangan yang aktif dalam menarik peluang investasi. Tidak heran dalam kurun waktu antara tahun 1870 hingga tahun 1914, di daerah-daerah yang terdapat peluang investasi produktif, terdapat 25% hingga 40% investasi Inggris dari total investasi yang diperlukan.

Arus pinjaman ke negara-negara berkembang mengalami penurunan dalam kurun waktu antara tahun 1918 sampai tahun 1928. dalam kurun waktu ini, perekonomian dunia diguncang oleh beberapa kasus yang timbul akibat Perang Dunia I. Inggris, Perancis, dan Jerman mengalami kehancuran akibat

perang. Sementara itu Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi yang baru. Selama tahun 1920-an terjadi arus masuk investasi secara besar-besaran ke Amerika Serikat. Peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1918 hingga tahun 1928 ini, pada dasarnya hanya perpindahan faktor ekonomi buat dunia saja, dari Inggris ke Amerika Serikat. Namun, secara umum dalam kurun waktu tersebut, penarikan pinjaman dari negara maju ke negara berkembang mengalami penurunan yang cukup drastis.

Selain diakibatkan oleh perang dunia, Amerika Serikat ternyata tidak cukup mampu menggantikan Inggris sebagai penggerak investasi utama ke negara lain. Setelah tahun 1928, sebagian besar investasi yang terjadi di Amerika Serikat dialihkan dalam bentuk saham-saham yang di perjual belikan di bursa New York. Turunnya arus pinjaman ini diperberat dengan runtuhnya harga-harga saham di bursa New York, yaitu pada bulan Oktober 1929 yang mendorong terjadinya depresi besar.

Sementara di sisi lain, negara-negara berkembang yang semula tergantung sekali pada pinjaman luar negeri justru tidak berhasil membayar utang-utang serta bunganya. Sehingga terjadi kemacetan kredit yang dialami mula-mula oleh Bolivia pada tanggal 1 Januari tahun 1931, kemudian disusun oleh hampir semua negara Amerika Latin. Kegagalan negara-negara berkembang dalam membayar kewajibannya tidak terlepas juga dari kebijaksanaan hambatan impor yang dilakukan oleh negara-negara maju akibat depresi besar yang dialaminya.

Dalam kurun waktu tersebut, dasar pertimbangan pemberian pinjaman pun mengalami pergeseran. Kalau pada masa sebelumnya pemberian pinjaman semata-mata lebih ditekankan pada aspek ekonomi, lambat laun pemberian pinjaman yang mengalir ke negara-negara berkembang sedikit banyak didasarkan pada pertimbangan politik, baik politik yang menyangkut negara pemberi maupun politik yang menyangkut negara penerima bantuan.

Hal ini dapat dilihat dari komposisi pinjaman yang diberikan. Sejak awal tahun 1945 hingga awal tahun 1970, modal yang mengalir ke negara-negara berkembang terwujud dalam tiga bentuk utama, yaitu pinjaman resmi (*official loan*), kredit dagang jangka pendek yang diberikan para eksportir luar negeri dan investasi langsung (*direct investment*)

Dari ketiga bentuk aliran modal dari negara maju ke negara berkembang tersebut, peranan investasi langsung terus-menerus mengalami penurunan, sementara pinjaman yang bersifat resmi terus menerus mengalami peningkatan.

Peranan pinjaman komersial merupakan salah satu komponen utama dalam total dana yang mengalir ke negara berkembang. Sementara itu menurunnya investasi langsung, terutama pada dekade tahun 1950-an, berkaitan dengan suasana politik di negara penerima bantuan,. Meskipun investasi langsung sangat kecil kemungkinannya terancam kredit macet, namun ancaman nasionalisasi pemerintah negara tuan rumah menyebabkan minat investasi langsung, terutama dalam dekade tahun 1950-an mengalami penurunan.

Ancaman nasionalisasi ini terutama terjadi pada periode Perang Dunia II sehubungan dengan munculnya wilayah bekas jajahan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat., sebagai gambaran, nasionalisasi yang dilakukan Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan Belanda mulai tahun 1957. Tercatat ada 5 perusahaan yang sebagian besar berupa bank-bank milik Belanda yang berhasil dinasionalisasi.

Meskipun demikian arus masuk modal ke negara-negara berkembang tetap tumbuh dengan pesat. Diantara tahun 1950 – 1955, bantuan pemerintah negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) kepada negara-negara berkembang yang semula US\$ 1,9 miliar, meningkat menjadi US\$ 3 miliar di tahun 1956 dan US\$ 4,3 miliar pada tahun 1959. Angka ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 1975.

Penarikan pinjaman dari negara maju ke negara-negara berkembang mengalami puncaknya ketika terjadi kejutan harga minyak OPEC, antara tahun 1973 – 1974. Meskipun dalam tahun-tahun ini negara-negara yang tergabung dalam OPEC dalam memanfaatkan rezeki minyak tersebut. Namun secara umum, neraca transaksi berjalan negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak yang tergabung dalam organisasi OPEC defisit.

Krisis utang tersulit kembali dihadapi oleh negara-negara berkembang, terutama negara bukan pengekspor minyak, terjadi ketika muncul kejutan minyak kedua, antara tahun 1979 – 1981.

Pada tahun 1981, misalnya negara berkembang non OPEC memerlukan pinjaman US\$ 100 miliar hanya untuk menutupi defisit transaksi

berjalannya. Sementara di sisi lain negara berkembang pengeksport minyak mengalami surplus transaksi berjalan. Hal ini yang kemudian memunculkan krisis utang hingga sekarang. Krisis utang ini berkaitan erat dengan sifat institusional pokok dari kredit perbankan dari negara berkembang di akhir tahun 1970-an yakni dipergunakan kontrak pinjaman berbunga mengambang (*floating-rate loan contrac*). Sementara di sisi lain, negara berkembang yang menikmati rezeki minyak tidak mampu memanfaatkannya secara baik, juga mengalami krisis mulai tahun 1982.

Dampak terberat yang menyebabkan terjadinya krisis utang mulai tahun 1970 hingga sekarang adalah besarnya cicilan pembayaran dan bunga utang tersebut mulai tahun 1977 hingga sebesar US\$ 39,5 miliar.

Akibat pembayaran cicilan beserta bunga utang luar negeri tersebut yang begitu besar, menyebabkan semakin kecil manfaat yang bisa diperoleh negara berkembang terhadap utang yang diterimanya. Kenyataan ini dapat dilihat dengan makin besarnya *Resource Transfer* (RT) yang negatif.

Krisis utang telah mengubah transfer dana dari kreditur ke debitur sehingga transfernya bernilai negatif, yang berarti pinjaman baru lebih kecil daripada cicilan pokok dan bunga yang dibayarkan negara-negara penghutang.

Keadaan ini jelas menimbulkan masalah baru bagi negara-negara berkembang dalam usahanya mempercepat kegiatan pembangunannya. Di satu sisi, utang luar negeri yang diterimanya terbukti tidak efektif apabila dilihat dari besarnya dana yang keluar kembali ke negara kreditur. Di sisi lain, tanpa

bantuan lebih lanjut dalam jumlah yang relatif besar, akan memperlambat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.

D. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Indonesia

Mengingat akan pentingnya kebutuhan sumber dana yang berasal dari luar negeri telah dijadikan agenda dalam membahas perencanaan ekonomi sejak tahun 1947 melalui perencanaan Hatta, seperti yang tertuang dalam Dasar-dasar Pokok dari *Plan*, ini disebutkan bahwa pinjaman luar negeri beserta penanaman modal asing dijadikan sebagai unsur-unsur untuk membiayai *plan* perekonomian Indonesia.

Ini berarti bahwa sejarah penarikan pinjaman oleh Indonesia dari negara kreditur telah berlangsung lama, jauh sebelum pemerintah Orde Baru lahir. Pemberian bantuan baru diwarnai dengan suasana politik dan pertarungan ideologi yang kuat dan kental seperti kebanyakan negara-negara Asia Timur yang kontra Barat, Indonesia lebih cenderung untuk memilih negara-negara Eropa Timur yang berideologi kontra dengan Barat sebagai mitra dalam pinjaman-pinjaman dana.

Fakta ini dapat dilihat pada posisi utang Pemerintah Orde Lama yang masih harus dibayar oleh Pemerintah Orde Baru. USSR menempati urutan pertama dalam daftar negara-negara kreditur Indonesia.

Sayangnya utang yang diterima oleh pemerintah Orde Lama pada waktu itu tidak dapat dimanfaatkan secara tepat, sektor-sektor pembiayaan banyak diarahkan pada sektor-sektor yang kurang produktif. Sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat
commit to user

mercu suar. Sehingga secara ekonomis, proyek-proyek pada masa pemerintah Orde Lama tersebut yang ditandai oleh pinjaman luar negeri tidak efektif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ironinya, beban inefisiensi penggunaan dana tersebut harus tetap ditanggung oleh pemerintah Orde Baru, sehingga tidaklah heran apabila sebagian dari utang luar negeri Indonesia dewasa ini merupakan dari kewajiban pembayaran utang selama pemerintah Orde Lama.

Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan usulan *rescheduling*, yang semula jatuh tempo pada tahun 1967 ditangguhkan (*moratorium*) dari Juni 1966 sampai bulan Oktober 1971. Sesudah tahun 1971, pembayaran utang dilakukan dalam 8 (delapan) kali pembayaran, masing-masing pada tahun 1971, tahun 1972 – 1974, dan terakhir dalam tahun 1978.

Politik utang luar negeri tetap dijalankan ketika pemerintah Orde Baru berkuasa dengan terlebih dahulu menyelesaikan landasan cara pembayaran kembali utang-utang lama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan landasan kebijaksanaan baru pada tanggal Oktober 1966, yang menitik beratkan pada 8 (delapan) pokok yaitu: pertama, anggaran berimbang, kedua, membatasi pengeluaran anggaran tidak lebih dari 10% dari pendapatan nasional; ketiga, perbaikan struktural pada penarikan pajak; keempat, nilai tukar utang yang realistis, kelima, mengakhiri pemberian subsidi; keenam, peninjauan kembali kebijaksanaan harga; ketujuh, pengurangan jumlah pegawai sampai secukupnya; kedelapan, pembatasan ketat pemberian kredit perbankan.

Kebijaksanaan ini dijalankan untuk memperbaiki keadaan perekonomian yang parah, dimana inflasi mencapai 650%, pendapatan perkapita hanya US\$ 70 per tahun dan uang luar negeri yang harus dibayar sebesar US\$ 2,2 miliar. Tugas tersebut secara politis sebagaimana termaktub dalam TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Berangkat dari usaha perbaikan kondisi perekonomian tersebut, pada tahun 1966 diadakan usaha pendekatan ke luar negeri dengan tujuan: pertama, mengadakan penjadwalan kembali utang-utang lama; kedua, mengusahakan bantuan-bantuan keuangan yang baru dari luar negeri untuk mendukung neraca pembayaran Indonesia; ketiga, berusaha menarik penanaman modal asing ke Indonesia.

Realisasi kebijaksanaan tersebut dilakukan pertemuan multilateral di Jepang pada bulan September 1966 yang dikenal dengan sebutan *Tokyo Club*. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan *Paris Meeting* pada bulan Desember 1966 dan diteruskan pada bulan Februari 1967 di Den Haag Negeri Belanda.

Pertemuan telah yang melahirkan lembaga *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI) yaitu sebuah lembaga donor negara-negara kreditur untuk membantu memberikan bantuan dana bagi pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pinjaman pertama kalinya yang diberikan oleh IGGI adalah sebesar US\$ 200 juta. Kiprah IGGI sendiri sebagai lembaga donor berakhir pada tahun 1992.

E. Pemanfaatan dan Beberapa Permasalahan yang Muncul Akibat Utang Luar Negeri

Terbentuknya IGGI dapat dipandang sebagai awal ditempuhnya politik utang luar negeri pada pemerintah Orde Baru di Indonesia. Momen ini juga menandakan dimulainya kehadiran modal asing menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan penting dalam proses pembangunan Indonesia. Meskipun utang luar negeri menjadi komponen yang penting dalam struktur pembiayaan pembangunan, namun dalam menjalankan kebijaksanaannya, pinjaman dana yang berasal dari luar negeri tersebut didasarkan pada beberapa kriteria pokok yang tujuannya untuk menyelaraskan antara kebutuhan akan pinjaman dana luar negeri dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sebagaimana yang telah digariskan dalam GBHN.

Selain itu efisiensi dan efektivitas penggunaan dana menjadi pertimbangan utama, sehingga kriteria pokok tersebut diarahkan pada tiga hal yaitu; Pertama, bahwa bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan politik. Kedua, bahwa syarat-syarat pembayaran harus dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali. Ketiga, bahwa pengumuman bantuan luar negeri haruslah untuk pembiayaan proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Hatta (1976) yaitu bahwa kredit pembangunan dari luar negeri haruslah kredit jangka panjang dengan rente yang rendah, tidak boleh lebih dari 3 atau 3,1%. Bagi cabang-cabang industri, jangka kredit itu ditetapkan 10 dan 20 tahun, tergantung kepada corak industrinya. Kredit pembangunan infrastruktur

seperti irigasi, dam, tenaga listrik yang menimbulkan hasil kelak dalam jangka lama sekali, jangkanya 20 tahun ke atas. Kredit dibawah 10 tahun dengan rente 5% ke atas, meskipun mungkin bermanfaat, tetapi tidak dapat disebut bantuan. Bantuan yang benar-benar bernama bantuan ialah bantuan kredit yang mendorong pembangunan nasional supaya berjalan lancar. Suatu bantuan pembangunan harus bebas dari syarat politik apapun, juga bebas dari campur tangan bangsa asing dalam soal-soal dalam negeri bangsa yang menerima bantuan. Bantuan yang diberikan begitu saja kepada suatu negara yang kurang maju semata-mata untuk melepaskan negeri itu dari berbagai kesulitan keuangan, bukanlah bantuan pembangunan. Ini bantuan yang bersifat filantropi yang tidak mendidik untuk berusaha hemat. Pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional hendaklah usaha sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum maju berdasarkan pada cita-cita *self-help* dan *self-reliance* untuk mendorong timbulnya aktivitas ekonomi sendiri, untuk seterusnya dapat bergerak sendiri atas kekuatan sendiri.

Atas dasar kriteria utang Luar negeri yang dikatakan Hatta (1976) maka selama Repelita I hingga Repelita VI, bantuan luar negeri terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya pengeluaran pembangunan dari tahun ke tahun, dari hanya Rp. 118,2 miliar pada awal Repelita I, meningkat mejadi Rp. 27.398,3 miliar pada awal Repelita IV.

Peran utang luar negeri menjadi penting, oleh karena tabungan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan, ternyata belum mampu menutupi kebutuhan untuk membiaya pembangunan.

Tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, rata-rata hanya mampu menutupi setengah dari pengeluaran pembangunan. Bahkan pada tahun anggaran 1990 / 1991, tabungan pemerintah hanya menyumbang 30,42% terhadap total pengeluaran pembangunan. Angka-angka ini secara implisit juga menunjukkan besarnya proporsi utang luar negeri untuk menutupi pengeluaran pembangunan.

Selain itu, besarnya pengeluaran rutin yang menyedot tabungan pemerintah, sebagian besar disebabkan besarnya kurs pembayaran cicilan utang beserta bunganya. Selain itu peningkatan pengeluaran rutin ini sebagai akibat meningkatnya kegiatan aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat baik dari pusat maupun daerah. Tercatat, sejak awal Repelita I (1969 / 1970) hingga awal Repelita VI (1994/1995), porsi pembayaran cicilan utang dan bunga terhadap pengeluaran rutin telah meningkat rata-rata 9 kali, dari 5,9% menjadi 41,7%. Sedangkan terhadap total APBN, persentasenya menunjukkan trend yang fluktuatif dari 3,8% menjadi 25,3%.

Disisi penerimaan luar negeri, penerimaan yang bisa diambil melalui pos penerimaan migas, pajak, dan bukan pajak sebenarnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini secara riil masih belum mampu untuk

mengimbangi kebutuhan total dana untuk membiayai pembangunan. Sedangkan dari segi penerimaan luar negeri melalui sektor ekspor, diluar utang, juga menunjukkan trend yang terus meningkat. Bila pada tahun anggaran 1984/1985 bernilai US\$ 19.910 juta, baik migas maupun non migas, maka pada tahun anggaran 1993/1994 meningkat menjadi US\$ 38.052 juta.

Dalam kurun waktu tersebut, pangsa ekspor migas terus menerus mengalami penurunan, sementara ekspor migas menunjukkan trend yang sebaliknya. Kondisi ini jelas menimbulkan tantangan baru. Ekspor migas, sebagai komoditi andalan sejak puluhan tahun yang lalu tidak lagi mampu diharapkan untuk menopang pembangunan di masa yang akan datang.

Peningkatan di kedua jenis sumber penerimaan ini tidak terlepas dari berbagai kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang dimulai tanggal 1 Juni 1983 sampai dengan sekarang menunjukkan hasil yang menggembirakan. Deregulasi 1 Juni 1983 di bidang perbankan misalnya, telah mampu meningkatkan dana pembangunan masyarakat di lembaga-lembaga keuangan. Sampai dengan Nopember 1988 saja, dana yang berhasil diambil dari masyarakat sekitar Rp. 18 triliun. Sementara itu, deregulasi perpajakan dan deregulasi di bidang-bidang lain, mulai tahun 1985 yang tertuang dalam Inpres No. 4/1985 hingga akhir tahun 1993 yang berjumlah sekitar 16 macam kebijaksanaan deregulasi, telah mampu memperbaiki struktur penerimaan pemerintah.

Meskipun demikian, penerimaan dalam negeri kini masih belum mampu menutupi kebutuhan pembangunan. Hal ini mengisyaratkan bahwa

terjadi kesenjangan antara investasi dengan tabungan. Melebarnya kesenjangan ini mencerminkan pesatnya pertumbuhan investasi domestik yang melebihi kemampuan perekonomian dalam mengakumulasi tabungan nasional. Kesenjangan inilah yang kemudian ditutupi dengan dana yang bersumber dari biaya luar negeri.

Patut dicatat pula disini bahwa pesatnya pembangunan yang membutuhkan biaya besar dengan berbagai krisis pandangan tidak terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1970 hingga tahun 1981. Dalam periode ini perekonomian Indonesia tidak terbebani oleh persoalan pendanaan yang serius. Dengan harga minyak sebesar US\$ 35 per barel, Indonesia menikmati banjir petrodolar dan memungkinkan Indonesia untuk menghimpun dana pembangunan dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang singkat. Sehingga tidak heran, minyak ini mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi yaitu 9,9% pada tahun 1980-an. Namun secara riil, rezeki minyak ini terbukti tidak mampu meningkatkan hasil produksi. Hal ini disebabkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut tidak disebabkan oleh pertumbuhan sektor riil yang nyata.

Dari tahun 2004 sampai dengan November 2009, posisi utang luar negeri Indonesia secara nominal meningkat sebesar USD34,2 miliar (24,2%). Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut diikuti peningkatan PDB yang relatif lebih besar yaitu sebesar USD258,7 miliar (100,5%).

Secara umum beberapa indikator beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan signifikan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB terus menurun. Pada 1998 tercatat sebesar 150%, kemudian menurun menjadi 54,9% pada 2004 dan menjadi 30,1% pada 2008. Rasio utang terhadap ekspor juga mengalami penurunan secara signifikan dari 179.7% pada 2004 menjadi 93.7% pada 2008. Pada periode yang sama, *debt service ratio* Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2004 *debt service ratio* mencatat angka tertinggi 30,1%, kemudian terus menurun menjadi 18,1% pada 2008.

Sementara itu, per 30 Nopember 2009, rasio total utang pemerintah terhadap PDB menurun tajam menjadi 30 %, dari sebesar 47 % pada tahun 2005, dan sebesar 89 % pada tahun 2000.

F. Pendapatan Nasional

Tolok ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian antara lain adalah: pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada satu periode tertentu, sebab besarnya output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam sebuah perekonomian.

Pertama besarnya output nasional merupakan gambaran awal seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi

barang dan jasa. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya.

Kedua, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, dimana alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output perkapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan, jika sebagian besar output pendapatan semakin besar maka tahun kemakmuran dianggap semakin tinggi.

Ketiga, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang mendasar yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya.

Selain perhitungan pendapatan nasional, perhitungan pendapatan suatu daerah (region) diperlukan guna mengetahui perbedaan pembangunan yang dilaksanakan antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi

yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.

Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Perhitungan atas dasar harga berlaku (*current price*) merupakan jumlah seluruh barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Pada perhitungan atas harga berlaku belum menghilangkan faktor inflasi.

Perhitungan atas dasar harga konstan (*constant price*) menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan menilai harga suatu tahun dasar tertentu. Pada perhitungan atas dasar harga konstan ini, faktor inflasi telah dihilangkan. Perhitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral.

Ada beberapa cara yang lain yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah yaitu:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar
- b. Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar
- c. Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor.

2. Pendapatan Regional

Dan konsep di atas, dapat diketahui bahwa produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah kontra prestasi faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah

tertentu, atau merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa gaji dan upah, bunga, sewa dan keuntungan yang timbul dari wilayah tertentu.

Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tidak seluruhnya merupakan pendapatan penduduk dari daerah tersebut sebab ada sebagian pendapatan diterima oleh pendapatan wilayah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di wilayah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan tersebut sebagian akan menjadi milik orang lain yaitu milik orang yang memiliki modal tersebut. sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menanamkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan tersebut akan mengalir ke dalam wilayah tersebut dan menjadi pendapatan pemilik modal.

Pendapatan regional dapat dihitung melalui dua metode yaitu:

- a. Metode langsung, yaitu metode perhitungan dengan menggunakan data daerah tingkat II secara terpisah dengan data provinsi sehingga hasil perhitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut.
- b. Metode tidak langsung yaitu dengan cara mengalokasikan pendapatan provinsi menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokasinya.

Perhitungan dengan metode langsung dapat dilakukan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan produksi yaitu dengan cara menjumlahkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit ekonomi yang dikelompokkan menjadi sembilan sektor yaitu sebagai berikut 1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas dan air bersih; 5) bangunan; 6) perdagangan, hotel dan restoran; 7) pengangkutan dan jasa; 8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan 9) jasa-jasa lainnya.
 - b. Pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi suatu negara pada periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran pada empat pelaku ekonomi yaitu pengeluaran konsumsi (rumah tangga), pengeluaran perusahaan (investasi), pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih (X-M).
3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dan proses produksi. Pendapatan perkapita sering menjadi tolok ukur kemakmuran suatu negara

atau daerah. Pendapatan perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dan suatu negara untuk memperbesar output dalam laju yang lebih cepat dan pada pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan perkapita setelah sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dan suatu negara.

Berdasarkan tolok ukur tersebut, maka dimungkinkan untuk mengetahui seberapa proyek barang dan jasa riil yang tersedia dibagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumen dan investasi.

G. Pengeluaran Dalam Negeri (Pengeluaran Pemerintah)

Pengeluaran dalam anggaran pemerintah di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah untuk keperluan-keperluan gaji pegawai sehingga sifatnya bukanlah untuk investasi tetapi lebih untuk operasionalisasi perusahaan. Adapun pengeluaran yang terdiri dan sejumlah sektor. Namun tidak seluruh sektor dalam pengeluaran pembangunan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran bidang sosial atau pembangunan manusia.

Lewis dan Chakeri (2004) membagi pengeluaran pembangunan menjadi tujuh kelompok sektor, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Klasifikasi Sektor Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah

No	Kelompok Sektor	Kode Sektor	Sektor
1.	Primer	402	Pertanian dan kehutanan
		403	Sumber daya dan irigasi
2.	Sekunder	401	Industri
		407	Pertambangan dan energi
3.	Perdagangan dan transportasi	405	Perdagangan, pengembangna usaha daerah keuangan daerah dan koperasi
		406	Transportasi
		408	pariwisata dan telekomunikasi daerah
4.	Pendidikan dan kebudayaan	411	Pendidikan dan kebudayaan nasional, pemuda
		413	Olah raga
		416	Agama
		404	Tenaga kerja
5.	Kesehatan dan kesejahteraan	412	Kependudukan dan keluarga sejahtera
		413	Kesehatan, keajahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja
		409	Pembangunan daerah dan pemukiman
6.	Pembangunan regional dan lingkungan	410	Lingkungan hidup dan tata ruang
		414	Perumahan dan pemukiman
		417	Hukum
7.	Aparatur pemerintah dan pengawasan	418	Aparatur pemerintah dan pengawasan
		419	Politik, penerangan dan media massa
			Keamanan dan ketertiban

Sumber: Lewis dan Chakery (2004)

Berdasarkan data yang ada dari tahun 1996 sampai 2002, alokasi pengeluaran pembangunan provinsi masih lebih banyak untuk sektor-sektor di luar bidang pembangunan sosial. Kelompok sektor pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari enam sektor di atas tidak sampai setengah dari total pengeluarn pembangunan. Pada tahun 1996, rata-rata persentase investasi pembangunan sosial tersebut adalah 14,43%. Pada tahun tersebut persentasi

alokasi tertinggi ada pada Provinsi Aceh. Sedangkan terendah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun-tahun berikutnya, rata-rata persentasi investasi pembangunan sosial ini meningkat yakni tahun 1999 menjadi 18,40% dan 22,12%.

H. Defisit Anggaran

Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi, misalnya sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada atau tidak adanya perubahan gaji / upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi. Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi antara lain oleh perubahan harga bahan baku, tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), perubahan ketentuan upah yang secara umum mengikuti perubahan tingkat harga secara umum.

Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPB). Setidaknya ada enam sumber ketidakpastian yang

berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni (i) harga minyak bumi di pasar internasional; (ii) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC; (iii) pertumbuhan ekonomi; (iv) inflasi; (v) suku bunga; dan (vi) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD). Penetapan angka-angka keenam unsur di atas memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBN. Penerimaan dan pengeluaran untuk anggaran negara lazim disebut pendapatan dan belanja.

Dalam proses penyusunan RAPBN, angka-angka asumsi tersebut ditempatkan sebagai faktor luar yang menentukan kondisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun belanja. Penetapan angka asumsi dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari wakil-wakil dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Menteri Koordinator perekonomian, dan Badan Pusat Statistik yang bersidang secara rutin untuk membahas dan menentukan angka asumsi.

Angka-angka asumsi yang dihasilkan oleh tim tersebut selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menyusun RAPBN. Angkah-angka yang tertera masih berupa usulan dari pihak eksekutif (pemerintah) kepada pihak legislatif (DPR). RAPBN ini disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam suatu sidang paripurna yang merupakan awal dari proses pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR.

Perubahan terhadap angka asumsi RAPBN sangat mungkin terjadi selama berlangsungnya proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

Perubahan ini mencerminkan banyak hal diantaranya (i) Pemerintah dan DPR bertanggung jawab terhadap keputusan penetapan angka-angka asumsi dalam APBN; (ii) Angka asumsi ditetapkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan politik; dan (iii) Terjadi pergeseran secara riil status APBN, dari "milik pemerintah" menjadi "milik publik".

Secara garis besar APBN terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu (i) Pendapatan negara dan hibah; (ii) Belanja negara; (iii) Keseimbangan primer; (iv) surplus / defisit anggaran; dan (v) Pembiayaan. Format APBN secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komponen utama APBN

Kode Sektor	Sektor
I. Pendapatan Negara dan Hibah	A. Penerimaan Dalam Negeri - Penerimaan perpajakan - Penerimaan negara bukan pajak B. Hibah
II. Belanja Negara	A. Anggaran belanja pemerintah pusat - Pengeluaran rutin - Pengeluaran pembangunan B. Anggaran belanja untuk daerah - Dana perimbangan - Dana otonomi khusus dan penyeimbang
III. Keseimbangan Primer	
IV. Surplus / defisit anggaran	
V. Pembiayaan	A. Pembiayaan dalam negeri B. Pembiayaan luar negeri

Sumber: Syahrir (2003)

Defisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi APBN disaat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan. Terdapat empat pilihan cara untuk mengukur defisit anggaran,

yang masing-masing dikenal dengan sebutan (i) Defisit konvensional; (ii) Defisit moneter; (iii) Defisit operasional; dan (iv) Defisit primer.

1. Defisit konvensional yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.
2. Defisit moneter merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang).
3. Defisit operasional yang merupakan defisit moneter yang didukung dalam nilai riil dan bukan nilai nominal.
4. Defisit primer, merupakan selisih antara belanja (diluar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan

Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Dana tersebut biasanya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (*defisit financing*). Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya: 1) hutang; 2) menjual aset milik negara, dan 3) memperoleh hibah.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ghani dan Zang (1995) dalam penelitiannya menggunakan model Branson mengenai sustainabilitas utang luar negeri dan mengaplikasikannya pada negara miskin dan terjerat utang luar negeri dan mengaplikasikannya pada negara miskin dan terjerat seperti Ethiopia dengan

menyederhanakan utang luar negeri. Interaksi antara berbagai variabel kebijakan (utang, fiskal dan suku bunga) dengan variabel hasil (PDB dan pertumbuhan ekspor) dan kondisi ekonomi internasional, kemudian menggabungkan untuk melihat apakah negara tersebut sudah berada pada jalur utang luar negeri yang sustainable. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Sebuah reformasi kritis sangat diperlukan untuk membuat sebuah negara tetap berada pada jalur utang luar negeri yang sustainable; 2) Isu adanya debt-relief membutuhkan pertimbangan yang serius oleh masyarakat internasional pemberian pinjaman. 3) Mobilisasi sumber daya dan pertumbuhan membutuhkan penekanan yang tepat untuk memastikan terbayarkannya juga.

Penelitian yang dilakukan oleh Manzoochi (2001) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa external finance dapat memberikan kontribusi yang positif pada proses transisi dan meningkatkan dana kesejahteraan negara-negara yang dahulu memiliki perekonomian terpusat, khususnya dimana *domestic saving* belum berjalan dengan baik setelah adanya kontraksi awal perekonomian, tetapi seperti apa yang telah ditunjukkan pada proses awal transisi, utang luar negeri dapat menimbulkan konstrain yang kuat pada kapasitas utang luar negeri negara-negara di Eropa Tengah dan Timur. Jurnal ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman eksternal pada sepuluh negara selama periode 1990 - 1995, dan menghitung efek-efek dan *outstanding stock* dan *foreign liabilities* atas *net financial inflows*.

Suhud (2004), menurut Suhud selama masa campur tangan IMF di Indonesia setelah adanya krisis moneter menunjukkan banyak saran-saran yang diberikan kepada pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan karena semua saran yang diberikan IMF selalu terganjal dengan masalah pendanaan.

Semua saran tersebut tidak dapat berjalan karena sebelumnya segala sesuatu pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia berasal dari utang luar negeri.

Ceppie (2004), menyimpulkan bahwa diluar kerangka CGI, pemerintah Indonesia perlu mengintensifkan kerjasama bilateral dengan kreditor / donor multilateral dan bilateral yang memberikan kontribusi *pledge* signifikan (Bank Dunia, ADB, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, Kanada, IDB, UNDP). Hal ini sangat penting mengingat komitmen dan kesepakatan kerjasama bilateral dengan negara-negara/lembaga-lembaga itulah yang sebenarnya menentukan proses dan keputusan / hasil CGI. Sepanjang pemerintah Indonesia dan mitra bilateral berpegang pada komitmen dan ikatan yang telah disepakati, dukungan pendanaan berupa hibah dan pinjaman tetap dapat diterima.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan seluruh instrumen/mechanisme yang tersedia dalam kerjasama bilateral untuk menjamin aliran dana, membahas isu-isu penting dan memecahkan permasalahan-permasalahan. Dengan demikian pihak kreditor / donor tidak

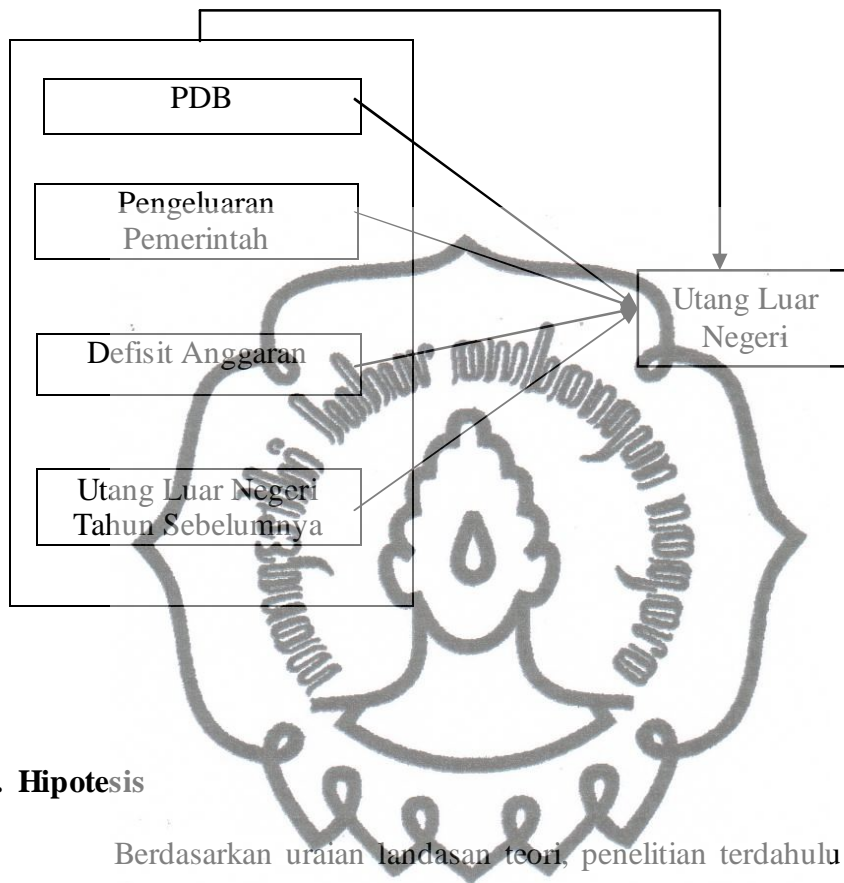
terlalu mengandalkan forum CGI yang dapat melemahkan *bargaining position* Pemerintah Indonesia

Achsani (2004) menyimpulkan bahwa pinjaman dalam bentuk dollar juga bisa membunuh, suatu sistem perbankan tidak akan mengalami krisis jika ia menerapkan *regime* mata uang mengambang dan memiliki kewajiban membayar utang dalam bentuk mata uang lokal. Dalam hal demikian, bank sentral memiliki kredibilitas kuat untuk membayar utang dalam mata uang yang dikendalikannya. Akan tetapi jika kurs mata uang dibuat mengambang dan kewajiban membayar utang dalam bentuk dollar, maka ada kemungkinan negara akan mengalami krisis keuangan apabila kurs mata uang ambruk secara tiba-tiba, sebagaimana yang terjadi di Ekuador. Kasus ini juga menimpa Indonesia tahun 1997 - 1998 lalu.

J. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian maka kerangka pemikiran penulis dan penelitian ini adalah utang luar negeri sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh pendapatan, pengeluaran pemerintah, defisi anggaran dan utang luar negeri tahun sebelumnya sebagai variabel independen. Adapun gambar kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



K. Hipotesis

Berdasarkan uraian landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan nasional terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009
2. Terdapat pengaruh yang signifikan pengeluaran dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009
3. Terdapat pengaruh yang signifikan defisit anggaran terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009

4. Terdapat pengaruh yang signifikan utang luar negeri sebelumnya terhadap utang luar negeri Indonesia dari tahun 1990 – 2009
5. Variabel independen (Pendapatan Nasional, Pengeluaran Dalam Negeri, Defisit Anggaran, Utang Luar Negeri Tahun Sebelumnya) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Utang Luar Negeri)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk analisis kuantitatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) antara tahun 1990 - 2009.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder yang digunakan adalah data utang luar negeri (ULN), Pendapatan nasional (PDB), Pengeluaran Dalam Negeri (PDN) dan Defisit Anggaran dari tahun 1990-2009 yang berasal dari laporan kantor BPS dan Bank Indonesia (BI).

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pernyataan tentang definisi, batasan, pengertian dan pengambilan variabel dalam penelitian, agar tidak terjadi salah tafsir atau persepsi terhadap suatu variabel yang ada dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Utang Luar Negeri (ULN)

Arus modal yang masuk ke dalam negeri terdiri atas arus pinjaman luar negeri dan arus investasi, yang dipakai dalam penelitian ini adalah arus pinjaman luar negeri (ULN) dan dalam satuan miliar rupiah mulai tahun 1990-2009.

commit to user

2. Pendapatan Nasional (PDB)

Tingkat pendapatan yang dimaksud adalah produk domestik bruto (PDB) per tahun mulai tahun 1990-2009.

3. Pengeluaran Dalam Negeri (PDN)

Rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran di dalam negeri, dihitung dalam miliar rupiah mulai tahun 1990-2009..

4. Defisit Anggaran (DA)

Kekurangan dana akibat adanya ketidaksesuaian antara rancangan APBN dengan realisasinya atau *fiscal gap* sehingga terjadi defisit, dihitung dalam miliar rupiah mulai tahun 1990-2009.

D. Model dan Alat Analisis

1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (*Ordinary Least Square*), dengan fungsi $ULN = f(PDB, PDN, DA \text{ dan } ULN_{t-1})$, maka persamaan regresi liniernya adalah :

$$ULN_t = \beta_0 + \beta_1 PDB_t + \beta_2 PDN_t + \beta_3 DA_t + \beta_4 ULN_{t-1} + \epsilon_t$$

Keterangan:

ULN_t = utang luar negeri tahun t

PDB_t = pendapatan nasional tahun t

PDN_t = pengeluaran dalam negeri tahun t

DA_t = defisit anggaran (DA)

ULN_{t-1} = utang luar negeri tahun sebelumnya

β_0 = konstanta regresi

Submit to user

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

e_i = variabel pengganggu pengganggu

t = tahun

2. Uji Statistik

a. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, maka dilakukan pengujian terhadap gejala autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

1) Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi antar variabel gangguan, sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Metode yang digunakan adalah dengan percobaan Durbin-Watson (*d-test*), dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan regresi seperti biasa untuk memperoleh nilai residual e_i dan d .
- 2) Mencari nilai kritis d_L dan d_U
- 3) Membandingkan nilai Durbin-Watson yang sudah diperoleh dengan nilai teoritis dengan menggunakan derajat kebebasan $(n; k-1)$, dimana k merupakan jumlah variabel bebas termasuk variabel konstanta.

Hipotesis yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah :

commit to user

- d <math> < d_U </math> : tidak ada autokorelasi positif
- d <math> < 4 - d_U </math> : tidak ada auto korelasi negatif
- d_U <math> < d < 4 - d_U </math> : tidak ada auto korelasi positif dan negatif

Dimana : d_U batas lebih tinggi dan d_L batas lebih rendah.

TABEL 3.1
Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_U$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif/negatif
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_L \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif

GAMBAR 3.1
Autokorelasi



2) Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi kolinieritas maka terdapat masalah multikolinieritas. Metode yang digunakan adalah pendekatan Koutsoyiannis. Metode yang dikembangkan oleh Koutsoyiannis (1977) menggunakan coba-

coba dalam memasukan variable bebas. Dari hasil coba-coba tersebut, selanjutnya akan diklasifikasi dalam 3 macam :

- (a) Suatu variable bebas dikatakan berguna
- (b) Suatu variable bebas dikatakan tidak berguna
- (c) Suatu variable bebas dikatakan merusak

Apabila nilai R^2 pada regresi dengan semua variable bebas lebih tinggi disbanding nilai R^2 pada regresi dengan masing-masing variable bebas, maka semua variable bebas memang layak/berguna untuk dimasukan ke dalam model (modul lab ekonometrika, 2007)

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan

White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (E_i^2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung χ^2 , di mana $\chi^2 = \text{Obs} * R^2$ (Gujarati, 2003).

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas.

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada heterokedastisitas

$H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada heterokedastisitas

commit to user

Perbandingan antara χ^2_{hitung} dengan χ^2_{tabel} , jika menunjukkan $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ maka berarti H_a diterima.

b. Uji t

Uji t merupakan uji secara individual dari semua koefisien regresi untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Gujarati, 1997).

Langkah-langkah pengujian : (Gujarati, 1997)

1) t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_1}{S_e(\hat{\beta}_1)}$$

Dimana :

$\hat{\beta}_1$: koefisien regresi

S_e : tingkat kesalahan

2) Hipotesis

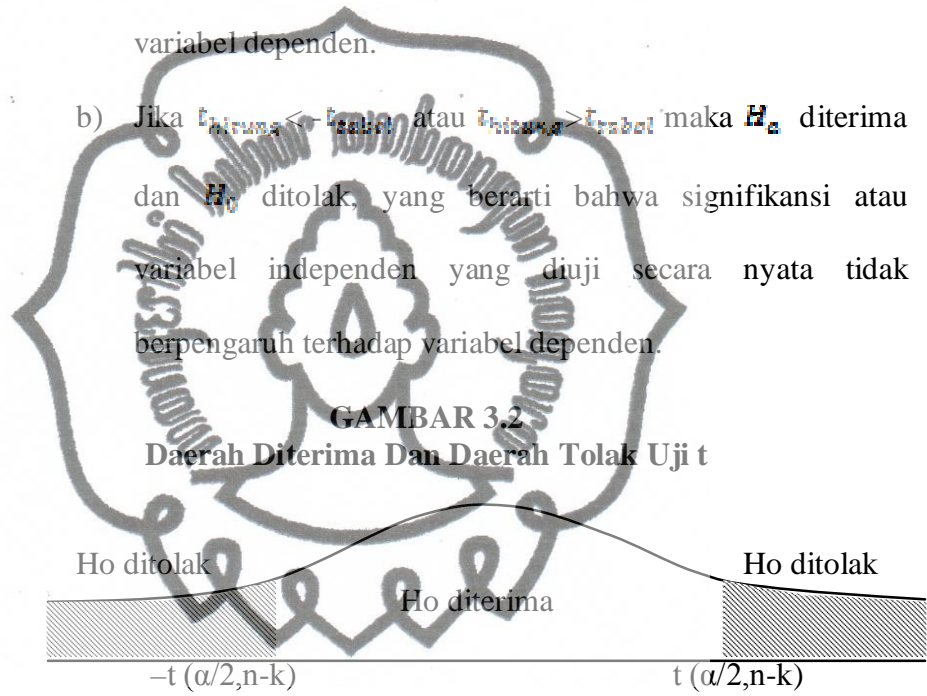
Dengan derajat kebebasan (n; k-1) dan taraf signifikansi 5%, maka:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$ artinya paling tidak salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

3) Kriteria Pengujian :

- a) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa signifikansi atau variabel independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa signifikansi atau variabel independen yang diuji secara nyata tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



c. Uji F

Uji F merupakan uji secara bersama-sama dari semua koefisien regresi untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Modul Statistik ekonomi, 2007).

Langkah pengujian : (Gujarati, 1997)

1) F hitung

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{MS_{e}} = \frac{R^2 / (k-1)}{SS_{e} / (n-k)}$$

commit to user

Dimana :

- R^2 = koefisien determinasi
- n = jumlah data atau sampel
- k = banyaknya variabel bebas

- 2) Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (df) pembilang (k-1) dan penyebut (n-k).

$$Df = k-1; n-k$$

- 3) Hipotesis

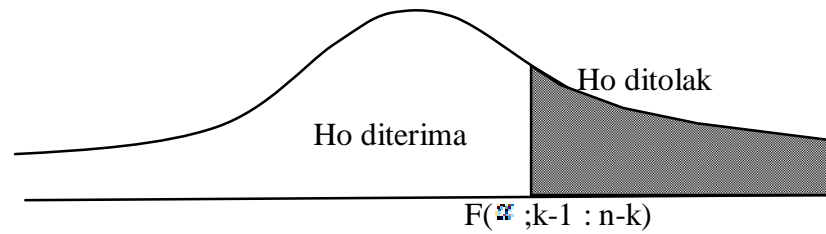
$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- 4) Kriteria Pengujian

- a) Jika $F_{hit} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti signifikansi atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $F_{hit} < F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti tidak signifikansi variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- c) Tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

GAMBAR 3.3
Daerah Diterima Dan Ditolak Uji F



d) Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur kebaikan dari model regresi maka diperlukan perhitungan determinasi (R^2), yaitu angka untuk persentase total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen dalam model.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Variabel-Variabel Penelitian

1. Variable Utang Luar Negeri (ULN)

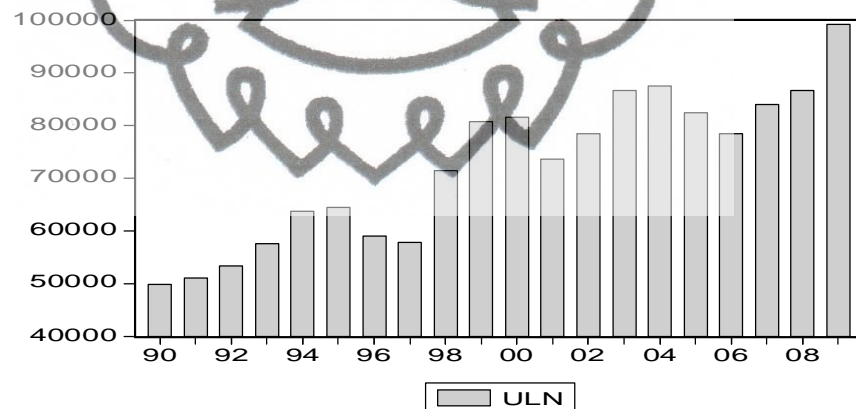
Dalam kasus Indonesia, perkembangan ULN-nya menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan atau laju pertumbuhan PDB riil dengan peningkatan jumlah ULN (*growth with indebtedness*). Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata pertahun sejak akhir tahun 1970 selalu positif dan tingkat pendapatan perkapita meningkat terus, tetapi jumlah ULN Indonesia juga bertambah terus setiap tahun. Seharusnya, korelasi negatif (*growth with prosperity*), hal ini mencerminkan bahwa walaupun Indonesia sudah lebih maju dibanding banyak LDCs (less developing countries) lain, terutama negara-negara di Afrika Tengah, ketergantungan ekonominya terhadap ULN tidak jauh berbeda dengan Negara-negara tersebut. Akan tetapi, banyak LDCs lainnya yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama dekade 1970-an hingga 1980-an juga menunjukkan fenomena yang sama seperti Indonesia.

ULN Indonesia terdiri atas utang jangka panjang pemerintah dan utang jangka panjang swasta yang digaransi maupun tidak oleh pemerintah, utang jangka pendek dan kredit dari IMF. Proporsi pinjaman dari IMF di dalam total ULN Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar sejak krisis ekonomi melanda Indonesia. Akhir tahun 1998

pinjaman Indonesia dari badan keuangan dunia tersebut mencapai 9 miliar dolar AS. Dapat dikatakan selama krisis, selain komponen-komponen ULN lainnya, pinjaman IMF menjadi sangat penting.

Laporan Bank Indonesia (BI) tahun 2000 menunjukkan bahwa ULN Indonesia sampai dengan oktober 2009 tercatat sebesar US\$172.871 juta atau meningkat 5,5% dari posisi utang terakhir tahun 2008 sebesar US\$ 155.080 juta. peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan posisi utang swasta maupun pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dapat diketahui perkembangan Utang Luar negeri Indonesia selama periode 1990-2009, sebagai berikut:

Gambar 4.1 Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1990-2009



Sumber: Data BPS diolah

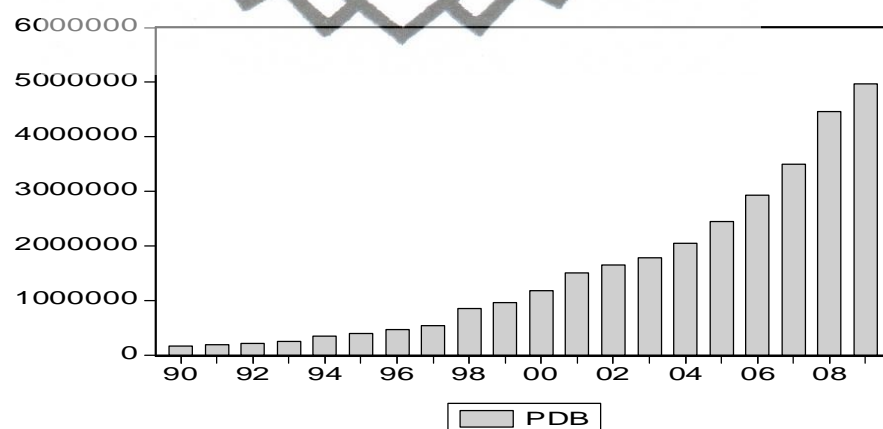
2. Variable Pendapatan Nasional (PDB)

Perhitungan PDB dapat memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemekmuran suatu Negara atau tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, semakin berkembangnya PDB, semakin sejahtera rakyat Negara tersebut. Sebelum krisis ekonomi (1990-1997) pertumbuhan

ekonomi Indonesia sangat berfluktuasi dengan kecenderungan naik,. Pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin morosot dan pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang melemahkan hampir setiap kegiatan perekonomian Indonesia. Periode 1999-2009 pertumbuhan ekonomi semakin meningkat yang mengakibatkan naiknya tingkat pendapatan perkapita.

Pendapatan nasional Indonesia selama periode 1990-2009 cenderung untuk terus naik, hanya pada tahun 1998 yang menurun, hal ini diakibatkan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, tetapi untuk tahun selanjutnya PDB mulai naik lagi walaupun secara perlahan. Berdasarkan data perkembangan PDB Indonesia periode 1990-2009 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2 Perkembangan pendapatan nasional Indonesia 1990-2009



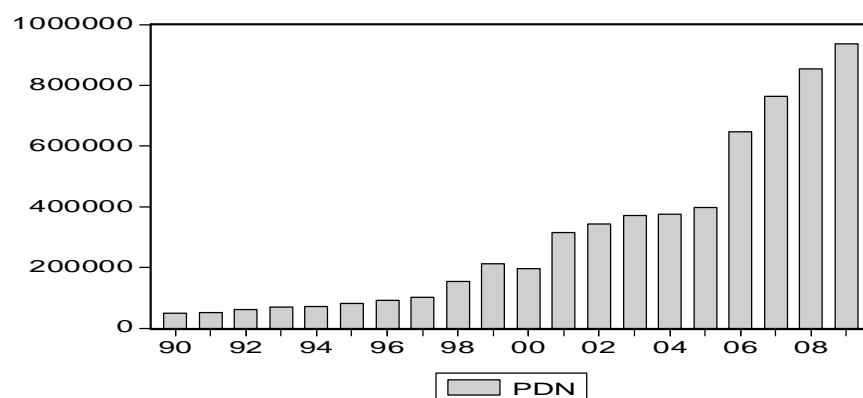
Sumber: Data BPS diolah

3. Variable Pengeluaran Dalam Negeri (PDN)

Dalam neraca Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasar berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi : belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi, angsuran dan bunga utang pemerintah, serta sejumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Agak sulit untuk membedakan dengan tegas apakah suatu pengeluaran termasuk kedalam pengeluaran rutin atau sebagai pengeluaran pembangunan, karena batas perbedaan antara keduanya relatif kabur (Dumairy; 1999). Sebagai contoh: berbagai upah dan gaji tambahan yang menurut logika termasuk pengeluaran rutin oleh pemerintah digolongkan sebagai pengeluaran pembangunan. Berdasarkan data dapat digambarkan perkembangan Pengeluaran Dalam Negeri Indonesia periode 1999-2009 sebagai berikut:

Gambar 4.3 Perkembangan Pendapatan Dalam Negeri Indonesia 1990-2009



Sumber: Data BPS diolah

commit to user

4. Variabel Defisit Anggaran

Defisit anggaran Negara adalah selisih antara penerimaan Negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran Negara lebih besar dari penerimaannya.

Para ahli ekonomi cenderung menghitung defisit anggaran Negara itu bukan dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila kita menghitung defisit anggaran Negara sebagai presentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran berapa persen suatu Negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit tersebut. Kecuali itu, dengan menghitung besarnya persentase defisit anggaran Negara terhadap PDB juga menggambarkan berapa tingkat defisit itu sudah membahayakan keadaan perekonomian.

Defisit Anggaran Negara dapat terjadi karena : (1) **mempercepat Pertumbuhan Ekonomi**, untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya Negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga Negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Beban ini meliputi pembangunan program-program,

commit to user

seperti : a. Program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, dll. b. Program yang berkaitan dengan Hankam. c. Pembangunan yang meliputi bidang hukum, misalnya proyek-proyek pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dll. d. program bidang sosial, pendidikan dan kesehatan , misalnya sekolah, rumah sakit, panti asuhan. e. program yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan, misalnya program transmigrasi, pembangunan daerah, dll. f. Program yang menangani masalah kemiskinan. (2) **Rendahnya Daya Beli Masyarakat**, masyarakat di Negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan perkapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang dan jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap tepuruk. Oleh karena itu, Negara memerlukan pengeluaran unntuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati. (3) **Pemerataan pendapatan masyarakat**, pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan diseluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk

mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, Negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh beda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada palayaran kapal perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya. (4)

Melemahnya Nilai Tukar, Indonesia yang sejak 1969 melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak. Sebagai contoh APBN 2000, disusun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp. 7100,-, dalam perjalanan tahun anggaran telah mencapai angka Rp.11.000,-, lebih per US\$ 1.00. (5)

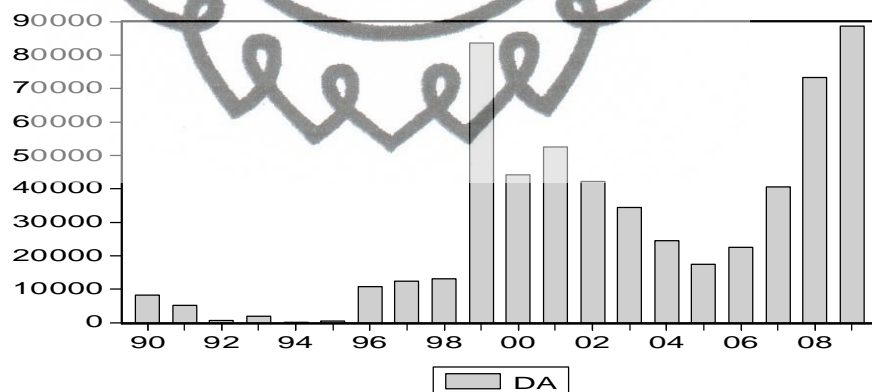
Pengeluaran Akibat Krisis Ekonomi, krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan meningkatnya pengangguran dari 34,5 juta orang pada tahun 1996, menjadi 47,9 juta orang pada tahun 1999. Sedangkan penerimaan pajak menurun, akibat munculnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal Negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong

miskin. Dalam hal ini Negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu. (6) **Realisasi yang Menyimpang Dari Rencana**, apabila realisasi penerimaan Negara meleset disbanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan Negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan, proyek atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, Negara harus menutupi kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula. (7) **Pengeluaran Karena Inflasi**, penyusunan anggaran Negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran, standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran Negara perlu direvisi. Anggaran Negara yang telah tercantum terlalu rinci dalam dokumen anggaran (DIPA), kuasa pengguna anggaran sulit untuk bisa menyesuaikan apabila

terjadi kenaikan harga barang yang melampaui harga standar. Untuk melaksanakan pembangunan proyek yang melampaui standar yang telah ditentukan, kuasa pengguna anggaran akan dipersalahkan oleh Badan Pengawas Keuangan, sebaliknya juga apabila Kuasa Pengguna Anggaran terpaksa mengurangi volumenya. Akibatnya, Negara terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar harga itu.

Penyusunan anggaran di semua Negara ditentukan oleh panduan pembangunan Negara tersebut. Berdasarkan data dapat digambarkan perkembangan Defisit Anggaran Indonesia periode 1990-2009, adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Perkembangan Defisit Anggaran Indonesia 1990-2009



Sumber: Data BPS diolah

B. Hasil Regresi

Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer Eviews. Hasil regresi linier berganda yang didapat adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
Hasil Regresi Linear

Variable	Coefficient	t-Statistic	
C	25019.36	2.517904	
PDB	0.004762	0.657735	
PDN	-0.014248	-0.404736	
DA	0.116344	1.323500	
ULNT	0.591204	3.583096	
R-squared	0.882333	Mean dependent var	73551.95
Adjusted R-squared	0.848713	S.D. dependent var	13671.00
S.E. of regression	5317.416	Akaike info criterion	20.21630
Sum squared resid	3.96E+08	Schwarz criterion	20.46483
Log likelihood	-187.0548	F-statistic	26.24488
Durbin-Watson stat	1.907010	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: Hasil olah data Eviews

C. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu: pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

1. Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi kolinieritas maka terdapat masalah multikolinieritas. Metode yang digunakan adalah pendekatan Koutsoyiannis. Metode yang dikembangkan oleh Koutsoyiannis (1977) menggunakan coba-coba dalam memasukan variable bebas. Dari hasil coba-coba tersebut, selanjutnya akan diklasifikasi dalam 3 macam :

- a. Suatu variabel bebas dikatakan berguna
- b. Suatu variabel bebas dikatakan tidak berguna
- c. Suatu variabel bebas dikatakan merusak

TABEL 4.2 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	R^2
ULN=f(pdb, pdn, da, ulnt)	0.882333
ULN=f(PDB)	0.698188
ULN=f(PDN)	0.660040
ULN=f(DA)	0.584656
ULN=f(ULNt-1)	0.816429

Sumber: Data diolah dengan *Eviews*

Nilai R^2 pada regresi dengan empat variabel bebas memberikan nilai yang lebih besar dibandingkan R^2 pada regresi dengan masing-masing variabel bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel memang layak/berguna untuk dimasukkan ke dalam model.

2. Autokorelasi

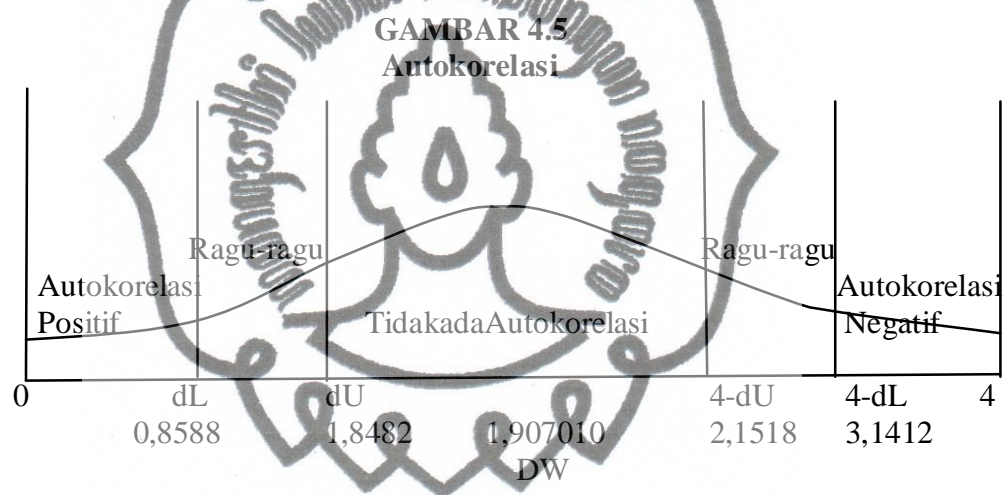
Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi antar variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Metode yang digunakan adalah dengan percobaan Durbin-Watson (*d-test*), dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan regresi seperti biasa untuk memperoleh nilai residual e_t dan d .
2. Mencari nilai kritis dL dan dU .

3. Membandingkan nilai Durbin-Watson yang sudah diperoleh dengan nilai teoritis dengan menggunakan derajat kebebasan $(n;k-1)$, dimana k merupakan jumlah variabel bebas termasuk variabel konstanta.

Dalam penelitian ini $k=4$ dan $n=19$, maka dari tabel Durbin Watson diperoleh nilai $dL= 0,8588$ dan $dU=1,8482$.

Dari hasil perhitungan analisis Durbin-Watson dengan program Evies diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,907010.



Dari analisis perhitungan Durbin-Watson diperoleh nilai DW sebesar 1,907010. Dari gambar 4.5 diperoleh kesimpulan bahwa nilai DW berada di daerah antara dU dan $4-dU$, artinya menerima H_0 yang berarti tidak terjadi autokorelasi dalam regresi linier berganda.

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan *White Test*, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas, variabel bebas

kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung χ^2 , di mana $\chi^2 = \text{Obs} * R \text{ square}$ (Gujarati, 2003).

Uji White Test

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas.

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada heterokedastisitas
- $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada heterokedastisitas

Hasil perhitungan yang didapat adalah $\text{Obs} * R \text{ square}$ (χ^2_{hitung}) = 5.554010 sedangkan $\chi^2_{\text{tabel}} = 15.50731$ ($df = 8$, $\alpha = 0,05$), sehingga $\chi^2_{\text{hitung}} < \chi^2_{\text{tabel}}$ (5.554010 < 15.50731). Perbandingan antara χ^2_{hitung} dengan χ^2_{tabel} , yang menunjukkan bahwa $\chi^2_{\text{hitung}} < \chi^2_{\text{tabel}}$, berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas.

TABEL 4.3 Hasil Uji White Test

F-statistic	0.516326
Obs*R-squared	5.554010

Sumber: Data diolah dengan *Eviews*

D. Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Diperoleh nilai R^2 dalam regresi sebesar 0.882333. Ini berarti variabel Utang Luar Negeri Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan nasional, PDN, DA dan ULNt-1 sebesar 88,23 persen, 11,77 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

commit to user

E. Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Gujarati, 2003)

$$t\text{-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$t\text{-hitung} = \frac{b_1}{Se(b_1)}$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 5\%$.

Jika $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel X_i berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika $t\text{-tabel} \geq t\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel X_i tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

TABEL 4.3
Hasil Uji t-Statistik

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Keterangan
PDB	0.004762	0.657735	1,761	Tidak signifikan
PDN	-0.014248	-0.404736	1,761	Tidak signifikan
DA	0.116344	1.823500	1,761	Signifikan
ULNt-1	0.591204	3.583096	1,761	Signifikan

Sumber: Hasil olah data *Eviews*

1. Uji t-Statistik Variabel Pendapatan Nasional

Hipotesis pengaruh variabel PDB terhadap variabel Utang Luar Negeri Indonesia yang digunakan adalah :

commit to user

Ho : $\beta_1 \leq 0$, berarti variabel PDB tidak berpengaruh terhadap variabel

Utang Luar Negeri Indonesia.

Ha : $\beta_1 > 0$, berarti variabel PDB berpengaruh terhadap variabel Utang

Luar Negeri Indonesia.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung PDB = 0.657735 sedangkan t-tabel = 1,761 (df (n-k) 19-5 = 14 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel (0.657735 < 1,761). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

2. Uji t-Statistik Variabel Pengeluaran Dalam Negeri (PDN)

Hipotesis pengaruh variabel PDN terhadap variabel Utang Luar Negeri Indonesia yang digunakan adalah :

Ho : $\beta_2 \leq 0$, berarti variabel PDN tidak berpengaruh terhadap variabel

Utang Luar Negeri Indonesia.

Ha : $\beta_2 > 0$, berarti variabel PDB berpengaruh terhadap variabel Utang

Luar Negeri Indonesia

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung PDN = -0.404736 sedangkan t-tabel = 1,761(df (n-k) = 14 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel (-0.404736 < 1,761). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

3. Uji t-Statistik Variabel Defisit Anggaran (DA)

Hipotesis pengaruh variabel DA terhadap variabel Utang Luar Negeri Indonesia yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_4 \leq 0$, berarti variabel DA tidak berpengaruh terhadap variabel

Utang Luar Negeri Indonesia.

$H_a : \beta_4 > 0$, berarti variabel DA berpengaruh terhadap variabel Utang

Luar Negeri Indonesia.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung DA = 1.823500 sedangkan t-tabel = 1,761 (df (n-k) = 14 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel (1.823500 > 1,761). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel defisit anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap utang luar negeri Indonesia.

4. Uji t-Statistik Utang Luar Negeri Tahun Sebelumnya (ULNt-1)

Hipotesis pengaruh variabel ULNt-1 terhadap variabel Utang Luar Negeri Indonesia yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_4 \leq 0$, berarti variabel ULNt-1 tidak berpengaruh terhadap variabel

Utang Luar Negeri Indonesia.

$H_a : \beta_4 > 0$, berarti variabel ULNt-1 berpengaruh terhadap variabel

Utang Luar Negeri Indonesia.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung ULNt-1 = 3.583096 sedangkan t-tabel = 1,761 (df (n-k) = 14 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel (3.583096 > 1,761). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, *commit to user*

yang menunjukkan bahwa t -hitung $>$ t -tabel, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel utang tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap utang luar negeri Indonesia.

F. Pengujian F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. (Gujarati, 2003)

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

$$F\text{-tabel} = (\alpha ; k-1, n-k) \alpha = 5\%, (5-1=4 ; 19-4=14)$$

Jika $F\text{-tabel} < F\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika $F\text{-tabel} \geq F\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah $F\text{-hitung} = 26.24488$ sedangkan $F\text{-tabel} = 3,11$ ($\alpha = 0,05 ; 4 ; 14$), sehingga $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($26.24488 > 3,11$). Perbandingan antara $F\text{-hitung}$ dengan $F\text{-tabel}$ yang menunjukkan

bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga di simpulkan bahwa variabel pendapatan nasional, PDN, DA, ULNt-1 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar Negeri Indonesia.

G. Interpretasi Hasil Regresi

1. Pendapatan nasional

Hipotesis 1 bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan nasional terhadap utang luar negeri Indonesia. Hasil nilai regresi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.004762. Pengujian memberikan hasil yang tidak signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Hipotesis 1 ditolak.

2. Pengeluaran dalam Negeri (PDN)

Hipotesis 2 bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. Hasil nilai regresi menunjukkan koefisien regresi sebesar -0.014248. Pengujian memberikan hasil yang tidak signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Hipotesis 2 ditolak.

3. Defisit Anggaran (DA)

Hipotesis 2 bertujuan untuk menguji pengaruh defisit anggaran terhadap utang luar negeri Indonesia, hasil regresi menunjukkan defisit anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara

statistik terhadap utang luar negeri Indonesia pada $\alpha = 5$ persen atau tingkat keyakinan 95 persen, hipotesis 3 diterima. Koefisien regresi sebesar 0.116344 dalam persamaan menunjukkan bahwa dengan naiknya defisit Anggaran (DA) sebesar 1 satuan, akan menaikkan tingkat Utang Luar negeri (ULN) sebesar 0,12 satuan.

4. Utang Luar negeri Tahun Sebelumnya (ULN_{t-1})

Hipotesis 4 bertujuan untuk menguji pengaruh utang luar negeri tahun sebelumnya terhadap utang luar negeri Indonesia. Hasil regresi menunjukkan utang luar negeri tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap utang luar negeri Indonesia pada $\alpha = 5$ persen atau tingkat keyakinan 95 persen, hipotesis 4 diterima. Koefisien regresi sebesar 0.591204 dalam persamaan menunjukkan bahwa dengan naiknya Utang Luar Negeri tahun sebelumnya sebesar 1 satuan, akan menaikkan tingkat Utang Luar negeri (ULN) sebesar 0,59 satuan.

5. Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen

Hipotesis 5 bertujuan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variabel independen (pendapatan nasional, PDN, DA, ULN_{t-1}) terhadap variabel dependen (utang luar negeri Indonesia). Hasil regresi menunjukkan variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap utang luar negeri

Indonesia pada $\alpha = 5$ persen atau tingkat keyakinan 95 persen, hipotesis 5 diterima.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial pendapatan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 1990-2009.
2. Secara parsial pengeluaran dalam negeri (PDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 1990-2009.
3. Defisit anggaran (DA) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap utang luar negeri (ULN) tahun 1990-2009. Koefisien regresi menunjukkan nilai positif, yang berarti semakin besar defisit anggaran akan semakin besar utang luar negeri Indonesia, karena untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah cenderung untuk menambah utang luar negeri dari pada mencari sumber-sumber pembiayaan selain utang luar negeri.
4. Utang luar negeri tahun sebelumnya (ULN_{t-1}) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap utang luar negeri (ULN) tahun 1990-2009. Koefisien regresi menunjukkan nilai positif, yang berarti semakin besar utang luar negeri tahun sebelumnya (ULN_{t-1}) akan semakin besar utang luar negeri Indonesia.
5. Secara simultan pendapatan nasional, pengeluaran dalam negeri (PDN), defisit anggaran (DA) dan utang luar negeri tahun sebelumnya (ULN_{t-1}) berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri (ULN).

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah :

- a. Besarnya sasaran defisit anggaran ditetapkan pada tingkat yang terkendali dalam jangka panjang. Penyusunan perkiraan penerimaan, pemilihan kegiatan prioritas, dan penentuan sumber pembiayaan harus diperhitungkan secara cermat hingga dicapai suatu keseimbangan dan kombinasi yang optimal diantara ketiga komponen tersebut, sehingga pembiayaan defisit anggaran yang berasal dari utang luar negeri dapat dikurangi.
- b. Pemerintah harus berupaya mencari cara lain untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit anggaran selain daripada hanya memperbesar utang luar negeri, misalnya dengan meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi asing di dalam negeri, dan lain sebagainya.

2. Bagi penelitian selanjutnya :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit anggaran memiliki peran yang besar terhadap peningkatan utang luar negeri Indonesia, diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi defisit anggaran (DA) atau apakah ada faktor lain diluar faktor yang digunakan dalam penelitian ini yang bisa mempengaruhi utang luar negeri.

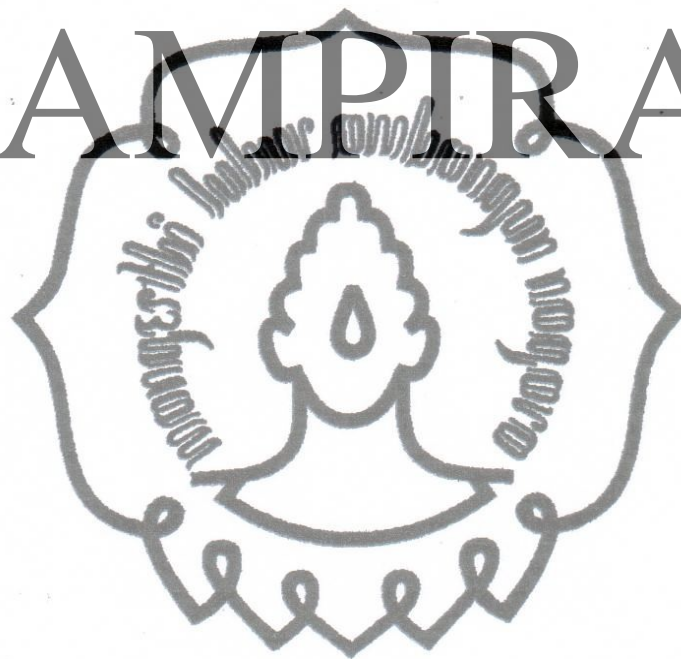
DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sriua & Adi Sasono, 2000, *Modal Asing, Beban Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta : UI Press.
- Basri, Faizal, 1999, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, Jakarta: Erlangga.
- Basri Y, Z. & Mulyadi Subri, 2003, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ceppie, 2004, *Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Luar Negeri dalam Rangka Mengurangi Ketergantungan Pada Pinjaman Luar Negeri*, Bappenas.
- Djiwandorno, Soedrajat, 2000, *Beberapa catatan Tentang Permasalahan Pinjaman Komersil Luar Negeri*, Jakarta: Usakit-Press.
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Gujarati. 1995. *Ekonometrika dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Rajawali pers, Jakarta.
- Manullang, M. 2002, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardja, 2001, *Utang dan Perekonomian*, Jakarta: Wahana.
- Purbayu Budi Santosa, 2005, *Analisis Statistik dengan MS' Exel dan SPSS*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Rachbini, Didik, J. 2000, *Resiko Pembangunan yang Dibimbing Utang*, Jakarta: Grasindo.
- Sjahrir, 2003, *Persoalan Ekonomi Indonesia: Moneter Perkreditan dan Neraca Pembayaran*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soelstyo,A Sukindro, 2002, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta : Kurnia.
- Sri Mulyani Indarwati, 2000, *Teori Moneter*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Suhud Muhamad, 2004, *Debt of Indonesia Post IMF Program*, INFID.
- Sumodiningrat, 2004, *Pengantar Statistik*, Yogyakarta: Andi Offset.

Supriyanto, 2000, *Utang Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
Winardi, 2003, *Pengantar Ekonomi Moneter 2*. Bandung : Transito.



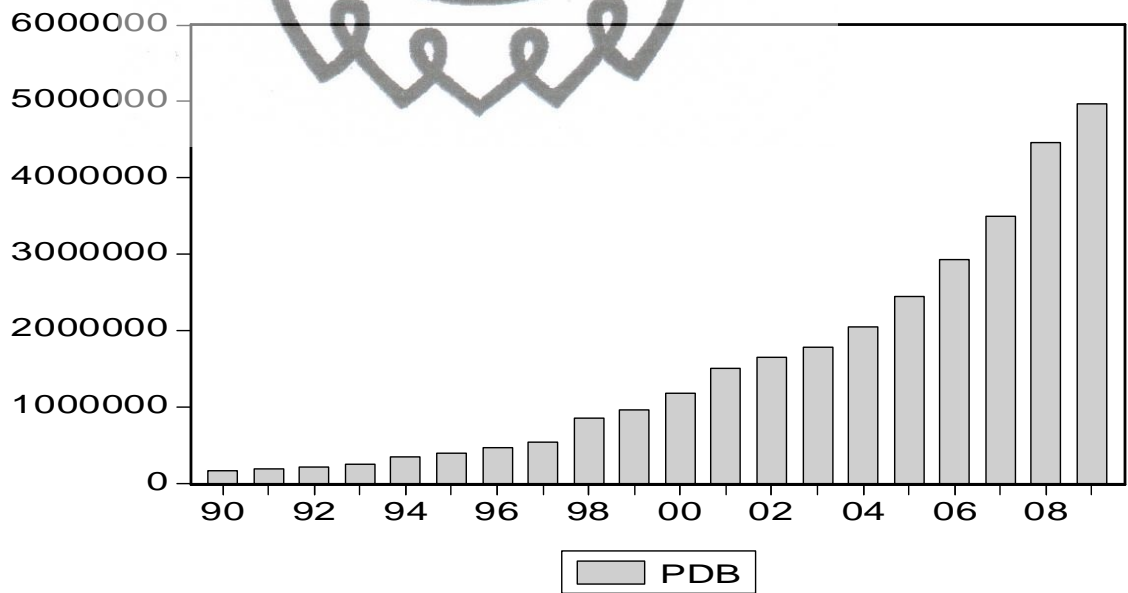
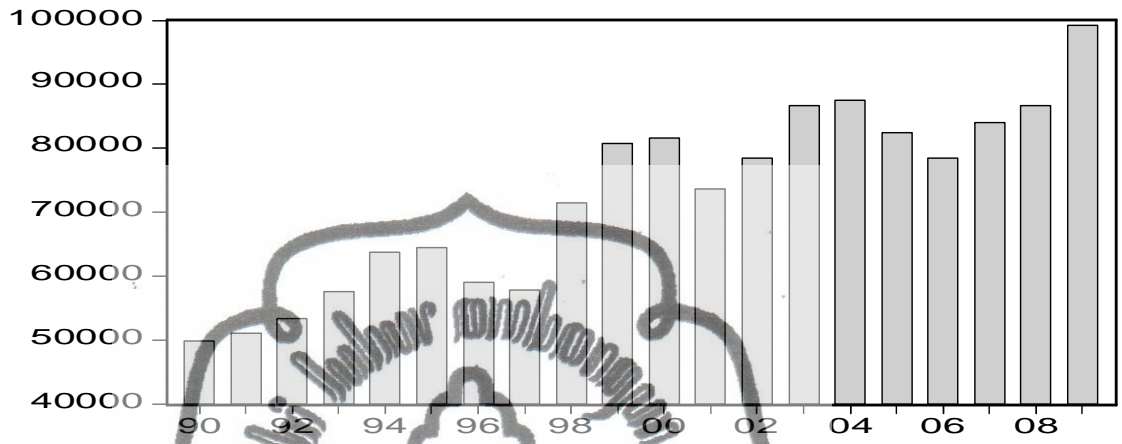
LAMPIRAN

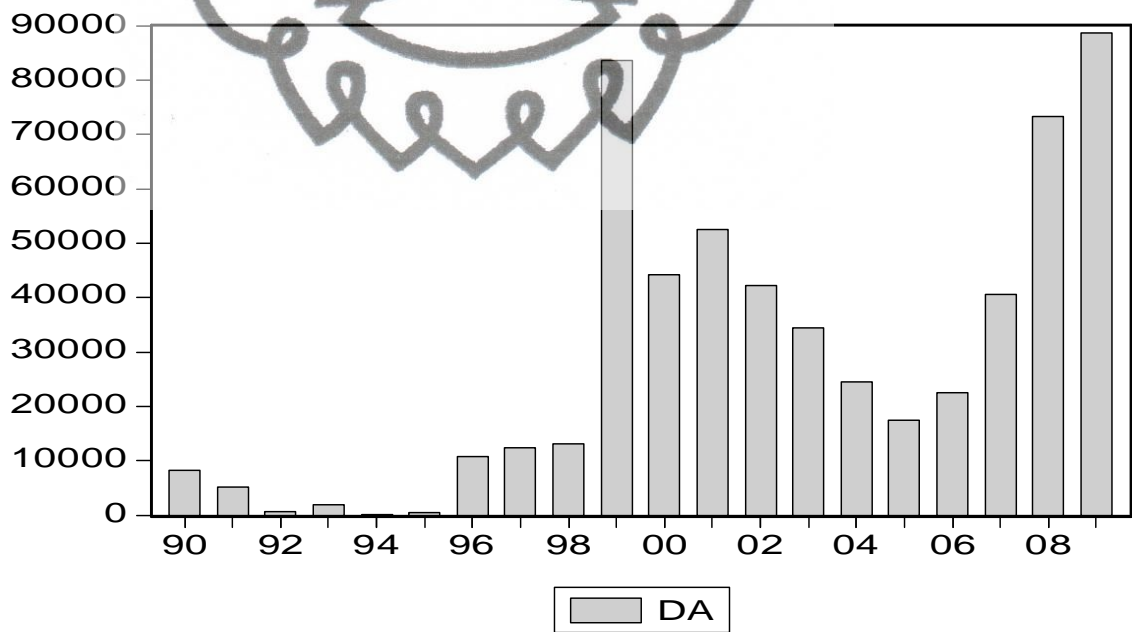
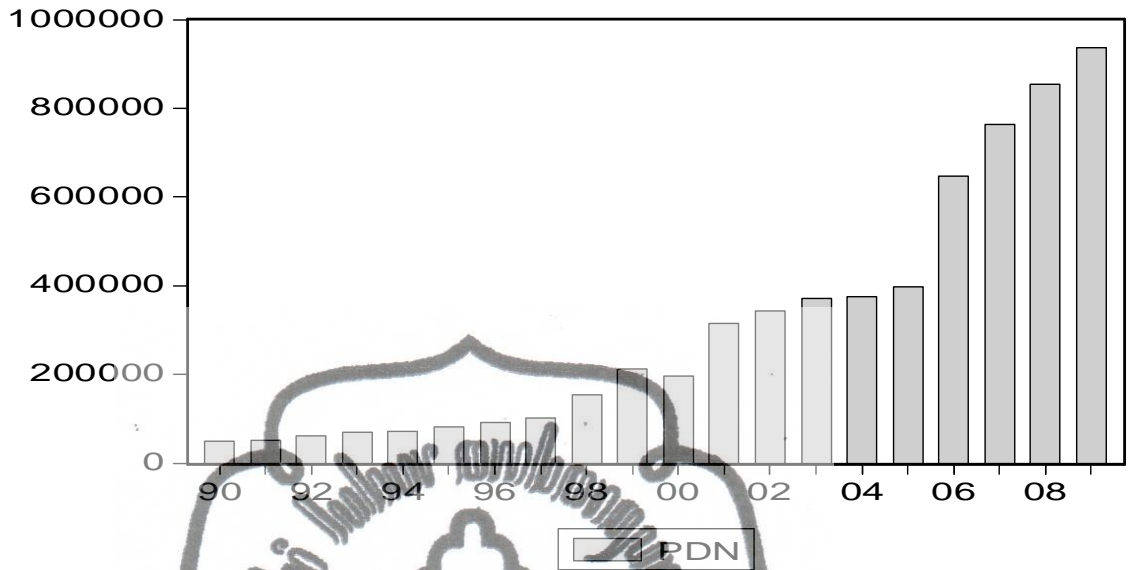


LAMPIRAN 1**Data Penelitian**

Tahun	Utang Luar Negeri	Pendapatan Nasional	Pengeluaran Dalam Negeri	Defisit Anggaran	Utang Luar Negeri Sebelumnya
1990	49837,00	163285,60	49450,00	8225,00	
1991	51047,00	190167,60	51992,00	5179,00	49837,00
1992	53284,00	216598,40	60511,00	550,00	51047,00
1993	57522,00	250397,80	68718,00	1852,00	53284,00
1994	63688,00	348710,60	72343,00	11,00	57522,00
1995	64411,00	391038,40	82353,00	375,00	63688,00
1996	59045,00	463412,80	90616,00	10795,00	64411,00
1997	57860,00	540126,90	101575,00	12413,00	59045,00
1998	71469,00	847591,60	153425,00	13026,00	57860,00
1999	80724,00	957633,70	212699,00	83495,00	71469,00
2000	81549,00	1174713,90	197030,00	44134,00	80724,00
2001	73615,00	1507589,60	315756,00	52529,00	81549,00
2002	78408,00	1644411,60	344009,00	42135,00	73615,00
2003	86657,00	1778660,00	370592,00	34436,00	78408,00
2004	87492,00	2046297,00	374351,00	24417,00	86657,00
2005	82431,00	2446847,20	397769,00	17392,00	87492,00
2006	78431,00	2932094,00	647668,00	22431,00	82431,00
2007	83989,00	3490777,30	763571,00	40513,00	78431,00
2008	86600,00	4460816,30	854660,00	73306,00	83989,00
2009	99265,00	4968645,80	937398,00	88637,00	86600,00

LAMPIRAN 2. Grafik Data





LAMPIRAN 3. Hasil Regresi

Dependent Variable: ULN

Method: Least Squares

Date: 10/16/11 Time: 08:41

Sample(adjusted): 1991 2009

Included observations: 19 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25019.36	9936.586	2.517904	0.0246
PDB	0.004762	0.007239	0.657735	0.5214
PDN	-0.014248	0.035203	-0.404736	0.6918
DA	0.116344	0.063803	1.823500	0.0896
ULNT	0.591204	0.164998	3.583096	0.0030
R-squared	0.882333	Mean dependent var		73551.95
Adjusted R-squared	0.848713	S.D. dependent var		13671.00
S.E. of regression	5317.416	Akaike info criterion		20.21630
Sum squared resid	3.96E+08	Schwarz criterion		20.46483
Log likelihood	-187.0548	F-statistic		26.24488
Durbin-Watson stat	1.907010	Prob(F-statistic)		0.000002

LAMPIRAN 4. Uji Koutsoyiannis untuk mendeteksi multikolinieritas

Dependent Variable: ULN

Method: Least Squares

Date: 10/16/11 Time: 10:15

Sample: 1990 2009

Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59679.91	2670.844	22.34497	0.0000
PDB	0.008233	0.001276	6.452886	0.0000
R-squared	0.698188	Mean dependent var		72366.20
Adjusted R-squared	0.681420	S.D. dependent var		14324.09
S.E. of regression	8084.927	Akaike info criterion		20.92803
Sum squared resid	1.18E+09	Schwarz criterion		21.02760
Log likelihood	-207.2803	F-statistic		41.63973
Durbin-Watson stat	0.592925	Prob(F-statistic)		0.000005

Dependent Variable: ULN
 Method: Least Squares
 Date: 10/16/11 Time: 10:16
 Sample: 1990 2009
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59755.30	2869.165	20.82672	0.0000
PDN	0.041034	0.006941	5.911627	0.0000
R-squared	0.660040	Mean dependent var		72366.20
Adjusted R-squared	0.641153	S.D. dependent var		14324.09
S.E. of regression	8580.684	Akaike info criterion		21.04705
Sum squared resid	1.33E+09	Schwarz criterion		21.14663
Log likelihood	-208.4705	F-statistic		34.94733
Durbin-Watson stat	0.624949	Prob(F-statistic)		0.000014

Dependent Variable: ULN
 Method: Least Squares
 Date: 10/16/11 Time: 10:17
 Sample: 1990 2009
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61094.32	3084.190	19.80887	0.0000
DA	0.391486	0.077774	5.033644	0.0001
R-squared	0.584656	Mean dependent var		72366.20
Adjusted R-squared	0.561581	S.D. dependent var		14324.09
S.E. of regression	9484.440	Akaike info criterion		21.24733
Sum squared resid	1.62E+09	Schwarz criterion		21.34691
Log likelihood	-210.4733	F-statistic		25.33757
Durbin-Watson stat	0.926985	Prob(F-statistic)		0.000086

Dependent Variable: ULN
 Method: Least Squares
 Date: 10/16/11 Time: 10:18
 Sample(adjusted): 1991 2009
 Included observations: 19 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7161.040	7759.518	0.922872	0.3690
ULNT	0.935736	0.107615	8.695231	0.0000
R-squared	0.816429	Mean dependent var		73551.95
Adjusted R-squared	0.805630	S.D. dependent var		13671.00
S.E. of regression	6027.187	Akaike info criterion		20.34525
Sum squared resid	6.18E+08	Schwarz criterion		20.44466
Log likelihood	-191.2799	F-statistic		75.60704
Durbin-Watson stat	1.451610	Prob(F-statistic)		0.000000

LAMPIRAN 5. Hasil uji White untuk mendeteksi heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.516326	Probability	0.819610
Obs*R-squared	5.554010	Probability	0.697049

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/17/11 Time: 00:54

Sample: 1991 2009

Included observations: 19

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.80E+08	3.48E+08	-0.516838	0.6165
PDB	-93.48190	151.0411	-0.618917	0.5498
PDB^2	2.76E-05	2.69E-05	1.025919	0.3291
PDN	595.8819	748.5691	0.796028	0.4445
PDN^2	-0.000800	0.000710	-1.126595	0.2862
DA	2085.631	1620.879	1.286728	0.2272
DA^2	-0.025163	0.018787	-1.339375	0.2101
ULNT	6418.876	10357.16	0.619753	0.5493
ULNT^2	-0.057603	0.075679	-0.761139	0.4641
R-squared	0.292316	Mean dependent var	20834145	
Adjusted R-squared	-0.273831	S.D. dependent var	25012046	
S.E. of regression	28229622	Akaike info criterion	37.45516	
Sum squared resid	7.97E+15	Schwarz criterion	37.90252	
Log likelihood	-346.8240	F-statistic	0.516326	
Durbin-Watson stat	3.182294	Prob(F-statistic)	0.819610	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126 Telp (0271) 647481 Fax. (0271) 638143

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret:

Nama : CATUR WIBOWO
 NIM. : F0104038
 Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN / S1 REGULER
 Tempat / Tgl. Lahir : SUKOHARJO, 10 FEBRUARI 1986
 Alamat : TEROK RT03 RW06 BEGAJAH SUKOHARJO JAWA TENGAH
 57515
 Pembimbing : Dr. GUNTUR RIYANTO, M.Si
 Judul skripsi : ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUTANG
 LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA DARI TAHUN 1990-
 2009

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya buat merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari, bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi:
 - a. Sebelum dinyatakan lulus, bersedia menyusun skripsi ulang dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan lulus, penjabutan gelar dan penarikan Ijazah kesajaranaannya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Surakarta, 17 November 2011
Mahasiswa yang menyatakan



CATUR WIBOWO
NIM. F0104038